

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor-sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah di dalam pelaksanaannya

Kondisi seperti digambarkan tersebut di atas, selaras pula dengan amanat Undang-Undang sektor ke PUPR-an yang meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sejalan dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, Menetapkan visi yaitu “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”.

Terkait dengan peran infrastruktur PUPR di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki 6 (enam) tujuan dalam pembangunannya yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah . Empat tujuan tersebut terdiri dari

1. *Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi guna mengerakkan sektor strategis ekonomi.*
2. *Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi bagi daya saing daerah.*

3. *Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia yang baik.*
4. *Mewujudkan Keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang.*
5. *Meningkatkan profesionalisme SDM baik laki-laki maupun perempuan penyelenggara & penyedia jasa konstruksi*
6. *Meningkatkan peran dalam pelayanan publik bagi laki-laki maupun perempuan, pengendalian dan pengawasan pembangunan prasarana & sarana pekerjaan umum*

Sasaran untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan tersebut, ditetapkan dalam 8 (delapan) sasaran yang masing-masing sasaran dikaitkan dengan tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk Mendukung Tujuan 1, Sasarannya yaitu :
 - Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air
- b. Untuk Mendukung Tujuan 2, Sasarannya yaitu
 - Meningkatkan infrastruktur Transportasi (jalan/jembatan) yang berkualitas
- c. Untuk Mendukung Tujuan 3, Sasarannya yaitu :
 - Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi
 - Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur
- d. Untuk Mendukung Tujuan 4, Sasarannya yaitu :
 - Meningkatnya kepatuhan terhadap RTRW
- e. Untuk Mendukung Tujuan 5, Sasarannya yaitu :
 - Meningkatnya kemampuan SDM baik laki-laki maupun perempuan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi
 - Meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi penguji mutu konstruksi

- f. Untuk Mendukung Tujuan 6, Sasarannya yaitu :
- Mewujudkan sarana dan prasarana penunjang kehidupan dasara secara merata dan kontinyu

KATA PENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap satuan organisasi/kerja secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Semua itu memerlukan dukungan dan Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menuangkan gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2018. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah melalui proses diskusi, baik di lingkungan internal Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan maupun dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka sinkronisasi pelaporan dan penilaian.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sampai dengan tersusunnya laporan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Banjarmasin, Januari 2019

P e n y u s u n,

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Isu Strategis DPUPR.....	9
E. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	33
1. Sasaran RPJMD	34
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35
3. Bidang Sumber Daya Air	61
4. Bidang Bina Marga	69
5. Bidang Cipta Karya.....	74
6. Bidang Bina Konstruksi.....	80
7. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	82
8. Bidang Sekretariat	87
B. Akuntabilitas Keuangan	89
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2018	89
2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program.....	89
3. Perbandingan Program dan Kegiatan TA.2017 dan TA.2018.....	90
BAB IV PENUTUP	100
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2017 serta Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0366/KUM/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyajian laporan akuntabilitas kinerja tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan hasil pengukuran sasaran strategis melalui program / kegiatan tahun 2018 yang diukur didasarkan parameter indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja terpilih dari beberapa keluaran (output) dan atau hasil (outcome) maupun indikator masukan (input) sehingga dapat terlihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan yang telah diberikan dalam melaksanakan / penggunaan keuangan khususnya dana yang bersumber dari APBD tingkat I dibidang pekerjaan umum.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diatur dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didasarkan pada salah satu penjabaran visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dengan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air, sistem irigasi primer dan sekunder;
- c. pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan kebijakan pembangunan gedung, penataan bangunan, dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kebijakan peningkatan tenaga ahli konstruksi dan pengawasan kelembagaannya;
- f. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang daerah;
- g. pelaksanaan kebijakan preservasi jalan dan jembatan;
- h. pelaksanaan kebijakan penatagunaan dan penyelesaian sengketa

pertanahan;

- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan
- j. pengelolaan kesekretariatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai unit pelaksana teknis yaitu Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula dan Laboratorium Bahan Konstruksi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0155 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang unit pengelolaan produksi dan distribusi air baku dan air curah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengelolaan produksi dan distribusi air baku dan air curah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan produksi air baku dan air curah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan pelayanan distribusi air baku dan air curah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan pengkajian dan pengujian kualitas air baku dan air curah;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pengembangan teknologi produksi dan distribusi air baku dan air curah;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan pelayanan informasi, kerja sama kemitraan operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan serta produksi dan distribusi air baku dan air curah; dan
- g. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang pengujian serta pengendalian mutu/kualitas struktur dan bahan konstruksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi;

- a. penyusunan program penyelenggaraan pelayanan jasa Laboratorium Bahan Konstruksi;

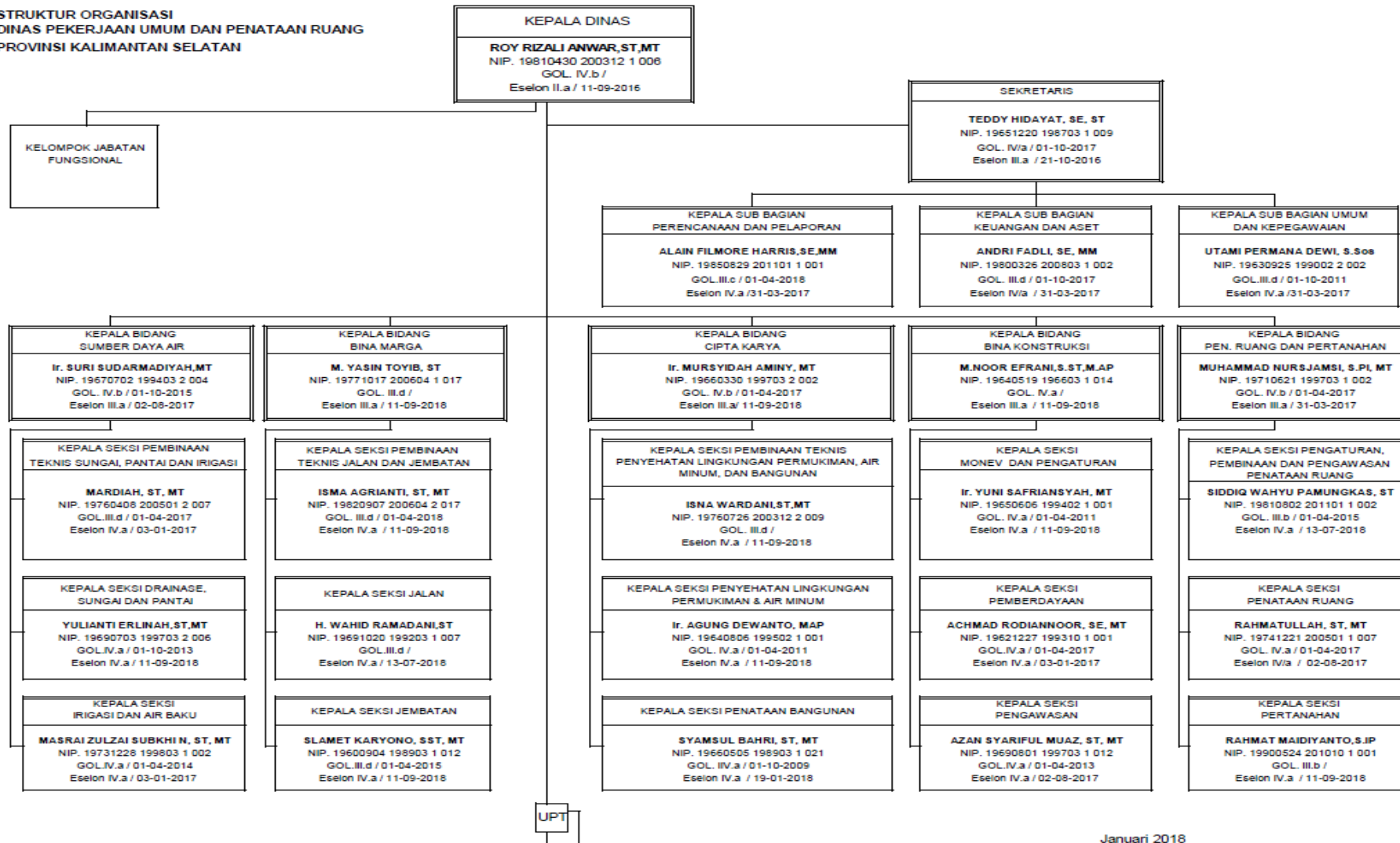
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengujian kualitas bahan konstruksi;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pengujian struktur konstruksi;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kemitraan dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan jasa Laboratorium Bahan Konstruksi;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengendalian mutu dan akreditasi Laboratorium Bahan Konstruksi; dan
- f. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan perencanaan strategis didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang merupakan implementasi dan perwujudan visi, misi serta program Gubernur dan Wakil Gubernur yang pelaksanaannya ditetapkan ke dalam rencana kerja tahunan sehingga capaian kinerja dapat terukur dan sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan.

Sebagai wujud pertanggungjawaban beban tugas yang telah ditetapkan dan untuk mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja serta untuk memberikan gambaran secara tertulis kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu setiap tahun anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menyusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

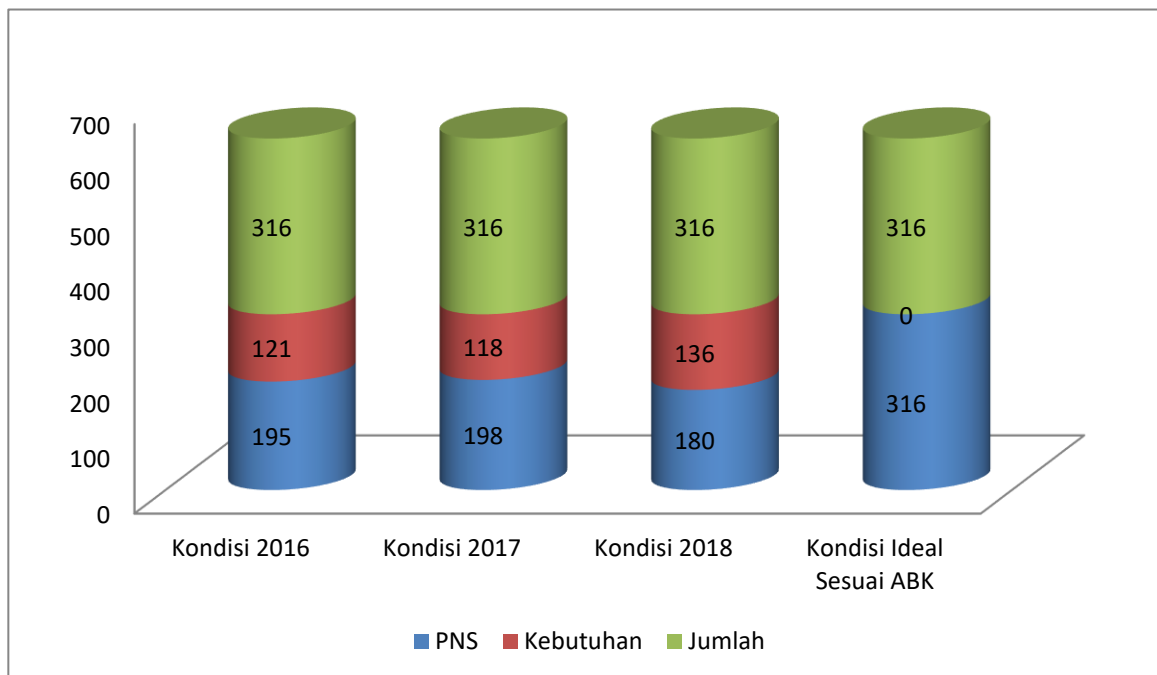


Januari 2018

a. Kepegawaian

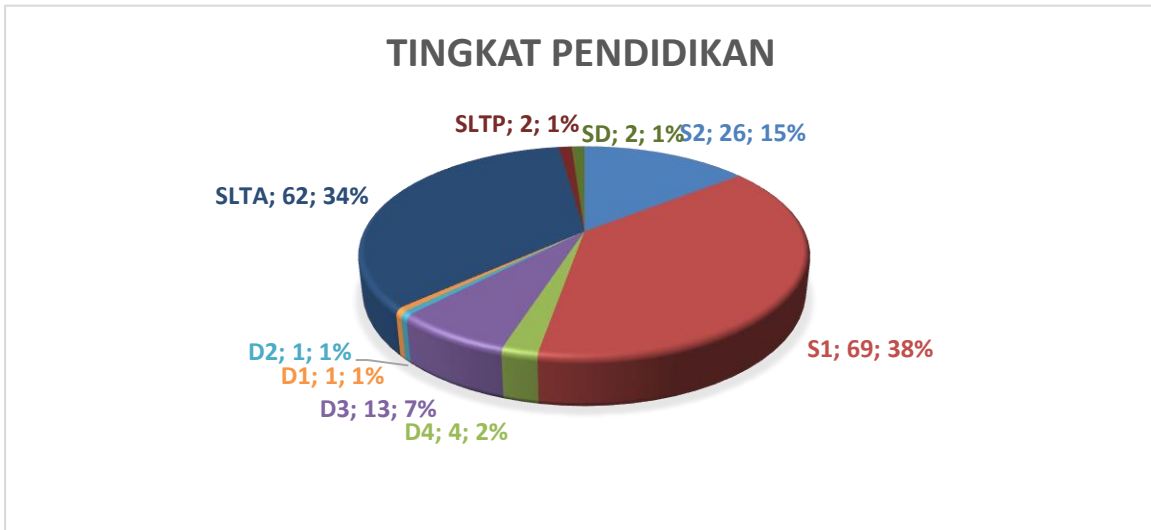
Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2018, pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel berjumlah 262 orang, yang terdiri dari 180 orang PNS dan 82 orang pegawai tidak tetap. Sedangkan menurut Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel membutuhkan pegawai sejumlah 316 orang dari berbagai disiplin ilmu sehingga jumlah PNS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel masih mengalami kekurangan sejumlah 118 pegawai.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai dan Kondisi Ideal ABK



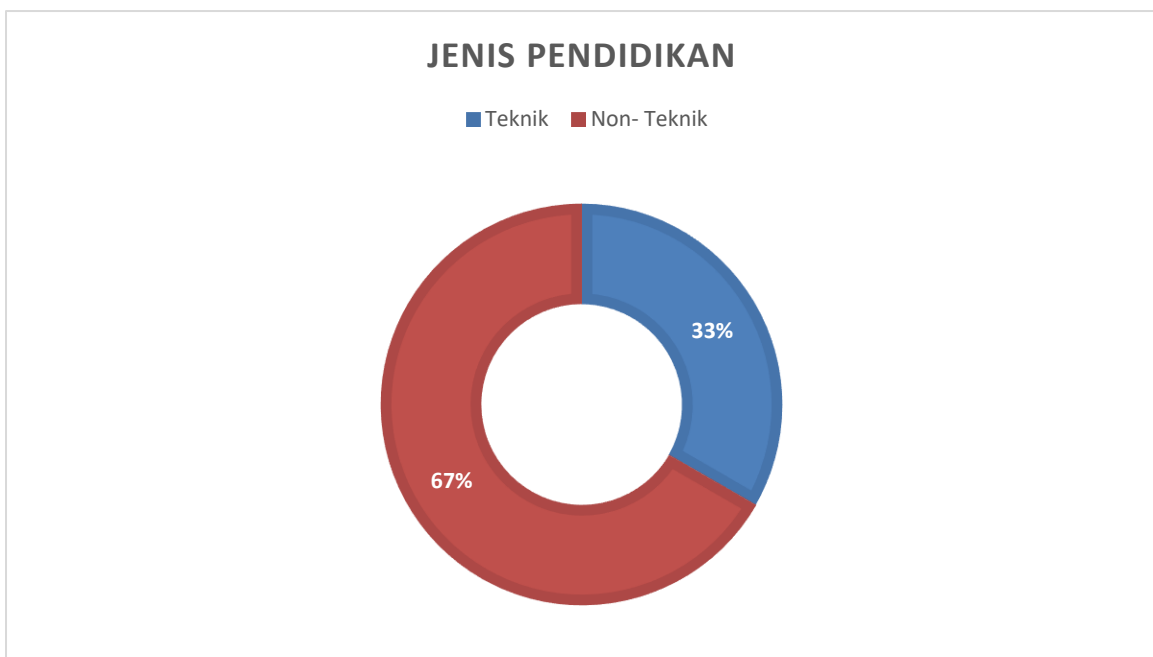
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel berjumlah 198 orang yang jika dikelompokkan berdasarkan posisi tingkat pendidikan, golongan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



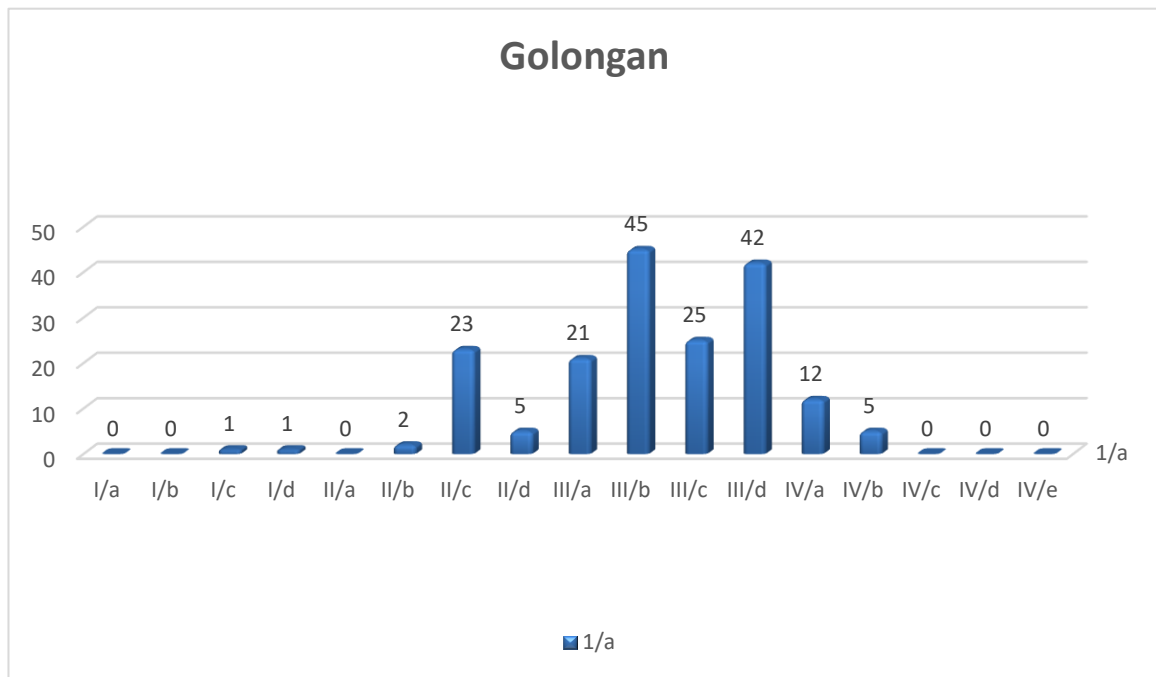
Berdasarkan diagram di atas dapat terlihat bahwa lebih dari 50% pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan sudah menempuh pendidikan perguruan tinggi. Namun pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang masih memiliki pendidikan tingkat SMA diharapkan dapat melanjutkan sampai perguruan tinggi melalui izin belajar dan tugas belajar.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan



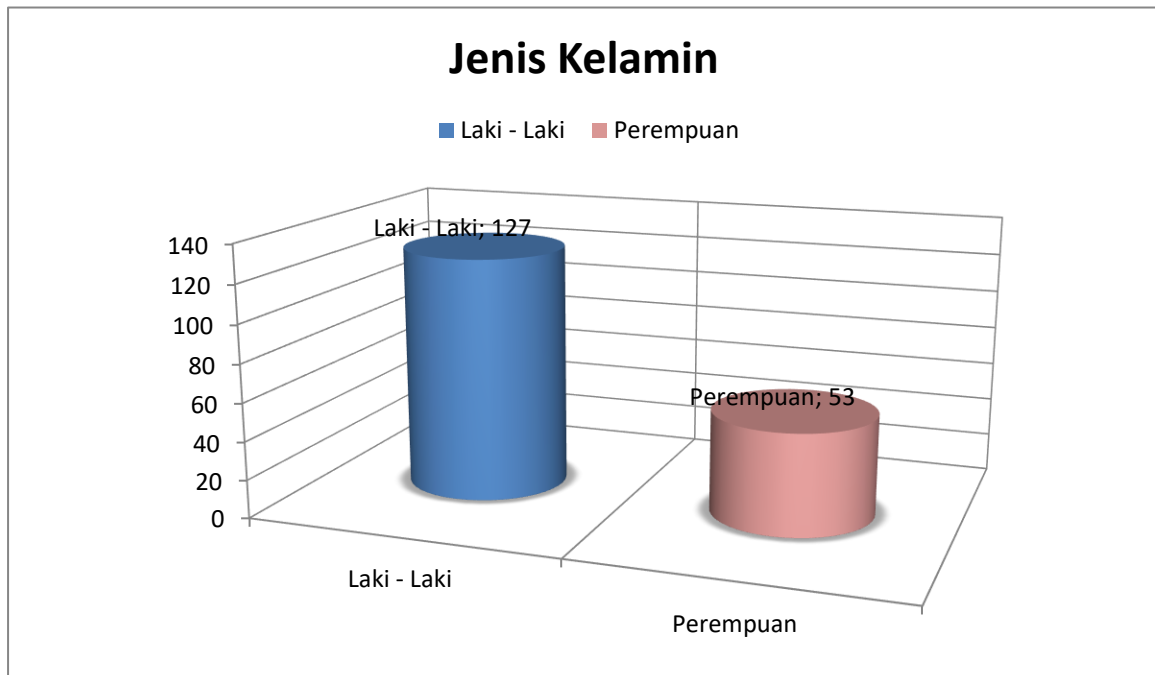
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan jenis pendidikan sebanyak 33% merupakan lulusan teknik dan 67% lulusan non teknik yang mana semuanya mampu berkinerja dengan baik di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih memerlukan pegawai yang pendidikan tingginya merupakan jurusan teknik.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan golongan



Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalsel berdasarkan golongan seperti terlihat tabel di atas adalah 70% merupakan golongan III dan 30 % merupakan golongan I, II, dan IV dari total 180 orang pegawai.

1.5 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin



Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan baik laki laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan maupun peranan dan tanggung jawab. Sehingga, dapat meningkatkan efektivitas pelembagaan PUG ke dalam budaya internal organisasi.

D. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara umum adalah sebagai berikut:

- Minimnya ketersediaan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Belum padunya pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur di wilayah kalsel.
- Perkuatan domestik connectivity (konektivitas inter dan intra pusat pertumbuhan) untuk mendukung infrastruktur kawasan metropolitan dan kawasan industry.
- Penguatan ketahanan pangan untuk mendukung kalsel menjadi kawasan lumbung pangan.
- Percepatan penyediaan air minum dalam rangka mencapai target Sdgs.

- Perencanaan pembangunan infrastruktur masih ada yang bersifat sektoral dan kurang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah reformasi birokrasi dalam rangka meningkat kualitas pelayanan publik.

a. SUMBER DAYA AIR

Isu strategis di bidang Sumber Daya Air terkait pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

1. Mendukung percepatan pembangunan bendungan Tapin (multi purpose) dalam rangka ketahanan pangan, ketahanan air dan ketahanan energi untuk Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Tapin khususnya yang pembangunannya melalui Pemerintah Pusat (BWSK II)
2. Mendukung penyediaan air baku di Kabupaten/Kota karena adanya ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih.
3. Mendukung percepatan rehabilitasi/peningkatan DI. Tapin untuk pemanfaatan air irigasi dalam mendukung swasembada pangan.
4. Mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Daerah Irigasi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, dengan percepatan penyelesaian 3 Daerah Irigasi, yaitu **DI. Amandit** Kabupaten Hulu Sungai Selatan, **DI. Batang Alai** Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan **DI Pitap** Kabupaten Balangan dalam rangka ketahanan pangan dimana kegiatan pembangunannya melalui Pemerintah Pusat (BWSK II).
5. Mendukung penyelesaian pembangunan Jaringan Irigasi Kinarum 1.004 Ha di Kab. Tabalong. Pembangunan **DI. Kinarum** dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi yang direncanakan mulai tahun 2015 – 2020 diharapkan pembangunan sampai dengan jaringan tersier.
6. Kinerja pelayanan jaringan irigasi belum optimal dalam mendukung ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Seluas 44.434 ha, yang terdiri dari 36.264 (8 DI) ha wewenang Pemerintah Pusat dan 8.170 ha (6 DI) wewenang Pemerintah Provinsi, jaringan sawah irigasinya sebagian sudah terbangun dan seluruhnya berfungsi, namun karena adanya kerusakan jaringan yang diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam dan kurangnya Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, sistem kelembagaan petani yang

masih belum berkembang, kemampuan pengelola OP (juru dan pengamat) dalam pengelolaan jaringan irigasi belum maksimal dan masih rendahnya keterlibatan petani dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuatif antara musim hujan dan musim kemarau.

7. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal, dimana dari 109.180 ha lahan rawa (60.347 ha dikelola Pemerintah Pusat dan 38.833 ha Pemerintah Provinsi) yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk dalam rawa bergambut, belum seluruhnya direklamasi pemerintah, sebagian adalah rawa alam yang direklamasi oleh masyarakat, sehingga sistem tata air sebagian besar masih belum bisa diatur dengan optimal (semi teknis).
8. Meluasnya kawasan pertambangan dan alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit, perumahan dll di Provinsi Kalimantan Selatan telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Untuk itu diperlukan konservasi berupa pembangunan Waduk/embung/situ/penampung air lainnya agar debit banjir dapat di kendalikan/dikurangi.
9. Dalam hal potensi daya rusak air, terjadi perluasan dampak kerusakan akibat banjir di WS. Cengal Batulicin. Selain itu juga terdapat fenomena meluasnya kerusakan pantai akibat erosi dan abrasi yang mengancam keberadaan permukiman, fasilitas umum dan pusat perekonomian di sekitarnya.

Berikut adalah rincian daerah rawan banjir WS.Cengal – Batulicin (Pola WS. Cengal Batulicin, tahun 2013).

Tabel 1.6 - Daerah Rawan Banjir WS Cengal-Batulicin

No	Nama DAS	Luas DAS (Ha)	Genangan	
			Luas (Ha)	Kecamatan
1	DAS Swarangan	30.600	1.470	Jorong
2	DAS Asam-asam	38.500	2.662	Jorong
3	DAS Kintap	72.100	677	Kintap

4	DAS Cuka	72.400	1.599	Satui
5	DAS Sebamban	32.400	715	Kusan hilir
6	DAS Kusan	206.700	10.097	Kusan hulu
7	DAS Batulicin	130.700	2.343	Batulicin
9	DAS Cantung	108.000	1.066	Kelumpang Hulu
10	DAS Sampanahan	172.200	768	Sungai Durian
11	DAS Cengal	146.400	2.589	Pamukan Utara

Sumber : Studi Potensi Rawan Banjir, 2012

Pembangunan bangunan pelindung pantai dan muara sungai di 3 Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru (di P. Kalimantan) juga menjadi titik berat penanganan daya rusak air bidang SDA kedepan. Antara lain lanjutan pembangunan bangunan pelindung pantai Kuala Tambangan Kab. Tanah Laut, bangunan pelindung Pantai Tabanio Kab. Tanah Laut.

10. Penyelenggaraan dan pengelolaan sumberdaya air selama ini mengalami beberapa kendala, diantaranya penyediaan sistem informasi data hidrologi belum cukup tersedia, dengan keterbatasan data yang ada, berakibat kurangnya data yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan dan pengelolaan bidang SDA.
11. Pengelolaan Sumber Daya Air selama ini yang belum optimal, terutama dalam pengelolaan OP prasarana jaringan irigasi/rawa salah satu faktor penyebabnya adalah masalah SDM. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pengelola SDA dari Pemerintah Provinsi (Juru/Pengamat) dan kemampuan SDM pengelola SDA yang masih kurang menjadi salah satu factor penyebabnya.

b. BINA MARGA

Transportasi merupakan suatu sarana yang berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dimana semakin baik sarana dan prasarana transportasi maka akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan. Peranan transportasi sangat penting dalam pembangunan, baik sebagai unsur perangsang maupun sebagai penunjang.

Isu strategis pada Bidang Bina Marga terkait Transportasi Teruntuk Jalan dan Jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan Meliputi :

1. Transportasi arus barang dan jasa serta orang antar wilayah dan antar titik pertumbuhan yang perlu dioptimalkan lagi dengan peningkatan di berbagai jalan provinsi dan strategis provinsi.
2. Meningkatkan keluasan jangkauan dan kemampuan jaringan jalan dalam melayani arus lalu lintas barang dan penumpang antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pengembangan jaringan jalan melihat dari potensi ekonomi, daerah perkebunan, pertambangan, peternakan, pertanian dan wisata yang belum terakomodir.
 - Koordinasi Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Laut.
 - Koordinasi Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Banjarbaru - Batulicin
4. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar kabupaten/kota dan provinsi.
 - Koordinasi Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Laut dengan Pulau Kalimantan
 - Koordinasi Pembangunan Jembatan Tabukan dan Jalan Aksesnya.
 - Penyelesaian Pembangunan jalan Marabahan – margasari, Buas buas – Negara dan Buas Buas – Tabatan baru.
5. Pengembangan jaringan jalan untuk mengantisipasi meningkatnya arus lalu lintas.
 - Penyelesaian pembangunan jalan matraman sei Ulin
 - Pembangunan Jalan Tol Banjarmasin – Banjarbaru – Martapura
 - Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Selatan Banjarmasin (Simpang 4 Gatot Subroto – Lingkar Selatan)
6. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk penanganan pertama dan menjaga kondisi jalan mantap

c. CIPTA KARYA

Isu strategis pada Bidang Cipta Karya meliputi :

1. Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

sehingga perlu peningkatan sinkronisasi dan fasilitasi melalui kegiatan koordinasi dan bantuan perbaikan prasarana.

2. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana perkantoran aparatur pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga perlu percepatan pembangunan fisik dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya perkantoran Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Rehabilitasi Kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Rehabilitasi Jaringan Listrik dan Rehabilitasi Rumah Dinas Pejabat Eselon II serta perlunya review masterplan kawasan perkantoran.
3. Belum optimalnya pembangunan fasilitas publik di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan fasilitas parasana dan sarana dalam rangka peningkatan kualitas manusia berupa fasilitas olahraga yang yang berstandar dan layak dan prasarana lingkungan lainnya. Untuk itu diperlukan adanya sebuah sarana olahraga dan hiburan bagi masyarakat melalui review masterplan fasilitas Sport Center dan Amdal, Pembangunan / penataan halaman Kantor Gubernur di Banjarnasin, Penyelesaian pembangunan Taman Edukasi Lalu lintas, Perbaikan lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

d. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Isu-isu strategis dan permasalahan penataan ruang dan pertanahan

1. Belum optimalnya keselarasan perencanaan Tata Ruang
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, sebagai unit kerha pengendali tata ruang provinsi masih belum bisa mengoptimalkan keselarasan antara tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/ kota, agar pemanfaatan ruang untuk pembangunan berjalan efisien dan efektif.
2. Belum optimalnya pengendalian evaluasi dan pemanfaatan ruang
Untuk menjamin pemanfaatan ruang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka sistem pengendalian dan evaluasi harus dioptimalkan. Melalui pengendalian dan evaluasi yang efektif maka berbagai kekeliruan atau penyimpangan dalam pemanfaatan ruang dapat diketahui sedini mungkin, sehingga alternatif pemecahannya dapat segera dirumuskan dan

diimplementasikan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar.

3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan tata ruang

Masih banyaknya aturan-aturan yang belum diperbaharui akibat adanya pembentukan unit baru yang menangani tata ruang baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sehingga koordinasi dan sinkronisasi masih banyak kendala.

4. Belum optimalnya kualitas/kuantitas data dan informasi tata ruang daerah
Data dan informasi tata ruang daerah selain sebagai dasar perencanaan juga merupakan alat ukur kinerja pembangunan daerah. Kualitas data dan informasi yang baik akan mendukung kinerja bidang tata ruang dan pertanahan provinsi sebagai aparat pengendalian pemanfaatan ruang provinsi.

e. BINA KONSTRUKSI

Isu-isu strategis dan permasalahan bina konstruksi

1. Kualitas keluaran pendidikan Nasional masih membutuhkan kurva belajar (learning curve) di dunia kerja, self improvement para SDM konstruksi Indonesia, sikap (attitude) kurang mendukung profesionalisme seorang profesional, kemampuan komunikasi SDM konstruksi rata-rata masih sangat kurang, terutama pada tingkat tenaga terampil.
2. Pelatihan konstruksi belum sepenuhnya berbasis kompetensi
3. Ketidak sesuaian kompetensi SDM Konstruksi dan kebutuhan Pasar
4. Kurangnya Pengakuan dan Perlindungan SDM Konstruksi.

f. LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

1. keterbatasan alat yang digunakan untuk menguji parameter yang diminta konsumen
2. keterbatasan referensi peraturan dan perundang-undangan tentang prosedur pengujian
3. kuantiti dan kualiti pada SDM yang masih sangat kurang.

g. BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA

Kebutuhan air minum/ bersih masih belum memadai dan pelayanannya belum dapat menjangkau seluruh wilayah permukiman di perkotaan lebih-lebih untuk wilayah perdesaan. Pelayanan air minum/ bersih di perkotaan sebagian dilayani oleh PDAM tersebar di masing-masing kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan, terutama untuk kabupaten banjar, banjarbaru, Banjarmasin, tanah laut dan Barito kuala (Banjarbakula) kesulitan dalam penyediaan air baku. Sebagian besar kondisi PDAM belum mampu menyediakan pelayanan yang optimal bagi masyarakat karena berbagai alasan, baik alasan teknis, keterbatasan instalasi, pendanaan maupun alasan pengelolaan

E. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar sasaran strategis jangka menengah dan perjanjian kinerja eselon II hingga eselon IV Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan,

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan uraian capaian kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Pengukuran kinerja yang dilaporkan pada bab ini yaitu menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2018. Selain itu terdapat realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja aparatur termasuk pembinaan terhadap ahklak, perilaku, dan pengawasan serta pengendalian manajemen untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas untuk melaksanakan program/ kegiatan.

Renstra juga merupakan salah satu fungsi dalam memberikan arah kebijakan dan sasaran lebih jelas yang berpedoman sebagai tolok ukur kinerja pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengarah dengan kebijakan dan program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD) 2016 – 2021, dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Visi merupakan gambaran menantang dalam menatap ke depan yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, arah strategi yang jelas dan mampu menjadi perekat untuk menyatukan berbagai gagasan strategis guna mewujudkan harapan secara konsisten, eksis, antisipatif, inovatif, dan dapat dirasakan sebagaimana yang diharapkan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan pendekatan Renstra yang jelas dan bersinergi dalam menyelaraskan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Renstra 2016 – 2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan untuk program dan kegiatan serta sebagai pedoman dalam pengendalian kinerja untuk mencapai visi dan misi 2016 – 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dari gambaran tersebut dapat diperjelas bahwa dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bagian dari visi dan misi Pembangunan Kalimantan Selatan, sehingga dapat dipandang sebagai:

- Alat bantu bagi manajemen pengelolaan pelaksanaan dan pembinaan masyarakat untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan;

- Gambaran tujuan dan sasaran, interpretasi serta strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjawab tantangan dan tuntutan serta hasrat orang banyak;
- Alat untuk memicu dan memacu aparat bersama masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ingin dicapai.

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan selaras dengan visi dan misi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk mencapai tujuan RPJMD tahun 2016 – 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan melalui program dan kegiatannya menyatakan tujuan dan sasaran strategis yaitu:

Tujuan dan Sasaran Strategis

Pada dasarnya pembangunan bidang ke-PUPR-an bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, baik berupa prasarana dan sarana irigasi/ rawa, jalan/jembatan, permukiman, lingkungan bersih dan sehat yang mantap, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan meningkatkan kelestarian sumberdaya alam dan keserasian lingkungan hidup. Sehingga Keberhasilan dalam pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan arah pertumbuhan wilayah dan pola tata ruang untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendorong kegiatan sektor lain yang akan memberikan kesempatan bekerja dan berusaha terutama di bidang konstruksi dan industri bahan bangunan.

Renstra merupakan suatu rencana yang dibuat dan ditetapkan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, dimana dalam penetapannya mengacu pada pernyataan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat lebih mengarah pada rumusan strategi kebijakan program dan kegiatan untuk merealisasikan tujuan visi dan misi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan strategis dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang ditetapkan seperti pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan 1	Meningkatnya pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi guna menggerakkan sektor strategis ekonomi.
Sasaran 1	Meningkatnya Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air
Tujuan 2	Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi bagi daya saing daerah.
Sasaran 2	Meningkatnya infrastruktur jalan/jembatan yang terintegrasi dan berkualitas untuk mendukung pergerakan orang, barang & jasa
Tujuan 3	Meningkatkan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia yang baik.
Sasaran 3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi
Sasaran 4	Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur
Sasaran 5	Mewujudkan sarana dan prasarana pemenuhan air curah dan air baku secara merata dan kontinyu
Tujuan 4	Mewujudkan Keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataan ruang.
Sasaran 6	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah
Tujuan 5	Meningkatkan profesionalisme SDM baik laki-laki maupun perempuan penyelenggara & penyedia jasa konstruksi
Sasaran 7	Meningkatnya kemampuan SDM baik laki-laki maupun perempuan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi
Sasaran 8	Meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi pengujian mutu konstruksi
Tujuan 6	Meningkatkan peran dalam pelayanan publik bagi laki-laki maupun perempuan, pengendalian dan pengawasan pembangunan prasarana & sarana pekerjaan umum
Sasaran 9	Meningkatkan pelayanan perangkat, kebijakan, pedoman rencana pembangunan dan evaluasi program administrasi Dinas PUPR

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian kinerja telah dibuat oleh seluruh pejabat struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan pada awal tahun 2018 sebagaimana lampiran dari dokumen ini. Dalam masa perjanjian kinerja, perjanjian kinerja dapat diperbaiki dalam hal terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan peraturan perundangan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran ataupun dalam rangka perbaikan karena indikator kinerja yang ditetapkan kurang tepat.

Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja tahun 2018:

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab	
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air	1. Persentase luas irigasi dan rawa dalam kondisi baik	%	22,8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2. Persentase luas jaringan irigasi/ rawa yang dikembangkan	%	51		
		3. Persentase jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun	%	50		
		4. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	%	64		
		5. Persentase penyediaan prasarana air baku	%	31		
2	Meningkatnya infrastruktur transportasi (jalan/ jembatan) yang berkualitas	1. Jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) (%)	%	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		2. Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) (%)	%	83,5		
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	%	82,4%		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai	%	44,12%		

4	Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur	Prosentase terbangunnya sarana dan prasarana publik	%	86,1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Prosentase terbangunnya sarana dan prasarana aparatur perkantoran	%	83	
5	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang daerah	1. Presentase kesesuaian ruang	%	100	
		2. Persentase penetapan produk hukum penataan ruang	dok	4	
6	Meningkatnya kemampuan SDM baik laki- laki maupun perempuan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi	Jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi serta memiliki sertifikat terampil	%	2	
7	Meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi pengujian mutu konstruksi	Persentase pelayanan pemohon pengujian yang dapat dilayani dengan sarana dan prasarana yang ada	%	100%	Laboratorium Bahan Konstruksi

Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang (Eselon III) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	78,22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Sekretariat)
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	%	100	
3	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase aset yang tercatat	%	100	
4	Meningkatnya Infrastruktur pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air	Persentase infrastruktur jaringan irigasi dan rawa dalam kondisi baik	%	5,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya)
		Persentase infrastruktur jaringan irigasi dan rawa yang dikembangkan	%	24	
		Persentase jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun	%	15	
		Persentase kenaikan luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	%	12	
		Persentase penyediaan prasarana air baku	%	9	
5	Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan dan jembatan provinsi	Persentase kenaikan panjang jalan provinsi kondisi baik dan sedang (%)	%	1,5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)
		Persentase kenaikan panjang jembatan provinsi kondisi baik dan sedang (%)	%	0,5	

6	Meningkatnya kualitas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yg aman	%	4,87%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
		Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%) atau Jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (SR)	%	5,38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
7	Meningkatnya Kondisi Baik Infrastruktur Publik dan Aparatur	Jumlah sarana dan aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)
		- Publik	unit	5	
		- Aparatur	unit	4	
8	Meningkatnya kualitas Jasa Konstruksi dan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	Prosentasi Pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang terintegrasi melalui 3 layanan dasar (SIPJAKI)	%	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Bina Konstruksi)
		Prosentasi meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi yang kompeten dan bersertifikat	orang	150	

		Prosentasi meningkatnya kualitas SDM jasa konstruksi yang kompeten dan bersertifikat	Kab/kota Perda orang	13 1 30	
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	%	66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang PPRP)
		Persentase pelaksanaan kegiatan penguasaan/penyediaan tanah untuk proyek pembangunan	%	20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan)
10	Meningkatkan jumlah penerimaan/Retribusi daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi	juta	110	Laboratorium Bahan Konstruksi
11	Meningkatkan Indeks Kepuasan Dari Penggunaan Jasa Uji	Tingkat Kepuasan Pengguna Jasa Uji Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi	%	100	
12	Tersedianya air minum secara merata di kawasan Regional Banjarbakula	Rata rata debit air yang dipenuhi pada kawasan Regional Banjarbakula	m ³ /th	4.500.000	Balai PAM Banjarbakula

Tabel 2.2.3 Perjanjian Kinerja Kepala Seksi (Eselon IV) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Penanggung jawab
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen perencanaan yang telah ditentukan dalam 1 tahun	Dok	3	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Bidang Sekretariat
		Jumlah dokumen pelaporan dalam 1 tahun	Dok	3	
2	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	Dok	6	Sub Bagian Keuangan dan Aset Bidang Sekretariat
		Persentase aset yang tercatat	%	100	
3	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	%	100	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bidang Sekretariat
4	Penyusunan dokumen perencanaan pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Air	dok	9	Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai dan Irigasi Bidang Sumber Daya Air
5	Pembangunan daerah irigasi/rawa	Panjang dan jumlah bangunan pada jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun	m	350	Seksi Irigasi dan Air Baku Bidang Sumber Daya Air

6	Pelaksanaan, peningkatan, rehabilitasi & OP daerah irigasi/ rawa kewenangan	Jumlah daerah irigasi / rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara	DIR	32	
			DI	7	
			M	550	
			Bendung	1	
7	Penyediaan prasarana air baku	Panjang & jumlah jaringan air baku yang dibangun	-	-	
8	Melaksanakan pembangunan tampungan air embung, situ, waduk	Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun	buah	1	Seksi Drainase, Sungai dan Pantai Bidang Sumber Daya Air
9	Melaksanakan pengelolaan sungai	Panjang sungai yang dikelola	Km	4	
			buah	2	
10	Melaksanakan pengelolaan pantai	Panjang pantai yang dikelola	-	-	
11	Melaksanakan pengelolaan drainase	Panjang drainase yang dikelola	-	-	
12	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kebinamargaan	Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan dan pelaporan bidang bina marga	dok	1	Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
13	Melaksanakan pembangunan jalan sesuai dengan standar bina marga	Panjang jalan yang akan di bangun pada tahun berjalan	km	36	Seksi Jalan Bidang Bina Marga
14	Melaksanakan pembangunan jembatan sesuai dengan standar bina marga	Pembangunan jembatan yang akan di bangun pada tahun berjalan		Jembatan eq 20 m, pondasi sumuran 4 titik	Seksi Jembatan Bidang Bina Marga

15	Pembinaan teknis keciptakarya	Jumlah SDM yang dibina terkait keciptakarya	orang	60	Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan Bidang Cipta Karya
16	Penyusunan dokumen perencanaan cipta karya	Jumlah dokumen perencanaan bidang Cipta Karya (Renstra, Renja, PK, APBD, APBD-P)	dok	5	
		Jumlah dokumen kajian teknis dan desain keciptakarya	dok	9	
17	Kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja/ instansi terkait pengaturan, penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja/ instansi terkait pengaturan, penataan bangunan dan lingkungan	Unit kerja	33	Seksi Penataan Bangunan Bidang Cipta Karya
18	Analisa tingkat kerusakan dan kebutuhan bangunan publik/ aparatur	Jumlah bangunan hasil analisa untuk direhabilitasi	bangunan	10	
		Jumlah bangunan hasil analisa untuk dibangun	bangunan	10	
19	Melaksanakan pembangunan bangunan gedung publik/ aparatur	Jumlah bangunan publik/ aparatur yang dibangun oleh bidang cipta karya	bangunan	25	
20	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana AMPLP	Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana air minum	Unit	4	Seksi Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan Bidang Cipta Karya
		Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana air minum	unit	29	

21	Pemberdayaan SDM profesional yang kompeten di bidang jasa konstruksi	Jumlah SDM / tenaga ahli jasa konstruksi yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan	orang	130	Seksi Pemberdayaan Bidang Bina Konstruksi
22	Pembinaan dan monitoring evaluasi pengaturan jasa konstruksi	Jumlah kabupaten/ kota yang sesuai perundang undangan jasa konstruksi	Kab/kota	13	Seksi Monev & Pengaturan Bidang Bina Konstruksi
		Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan peraturan penyengelaraan jasa konstruksi	perda	1	
		Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan sistem SIPJAKI	Kab/ kota (orang)	13 (40)	
23	Pembinaan dan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	Jumlah kabupaten/ kota yang tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	Kab/kota	13	Seksi Pengawasan Bidang Bina Konstruksi
24	Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota	Persentase penyelesaian revisi perda rencana tata ruang wilayah	%	10	Seksi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
		Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten	dok	1	

25	Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi	Persentase penyelesaian perda/ pergub rencana rinci tata ruang dan turunannya	%	17,71	Seksi Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
		Jumlah telahaan analisa kesesuaian tata ruang	dok	20	
26	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi	Jumlah luas tanah yang dibebaskan pada akhir tahun berjalan	ha	11,1	Seksi Pertanahan
		Jumlah luas cakupan peta lokasi, nilai tanah, dan data aset pertanahan pemerintah provinsi	dok	3	
27	Mewujudkan pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu bidang PU pada Laboratorium Bahan Konstruksi	Presentase pelayanan pengujian kelayakan bahan dan mutu bidang PU		324	Seksi Pengujian dan Pengembangan Teknologi Laboratorium Bahan Konstruksi
28	Mewujudkan pelayanan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelayanan perkantoran Lab. Bahan Konstruksi pada Dinas PUPR	Persentase pelayanan kepegawaian, keuangan dan pelayanan perkantoran/ rumah tangga pada Lab. Bahan Konstruksi Dinas PUPR dapat terlayani dengan baik	%	100	Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Bahan Konstruksi
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pada lab. Bahan Konstruksi	buah	30	

		Dinas PUPR dapat terpenuhi dengan baik			
29	Melaksanakan sosialisasi dan informasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan baik	dok	1	Seksi Kemitraan dan Pengendalian Mutu Laboratorium Bahan Konstruksi
30	Melaksanakan kegiatan kemitraan dan pengendalian mutu layanan laboratorium	Prosentase pelayan pengujian kualitas material dan analisis bahan konstruksi	orang	350	
31	Terlaksananya pengolahan dan produksi air minum	Rata – rata volume air minum yang diolah per bulan	m ³ /th	4.500.000	Seksi Produksi Balai PAM Banjarbakula
32	Terlaksananya pendistribusian air minum secara merata	Rata – rata volume air minum yang didistribusikan per bulan	m ³ /th	4.500.000	Seksi Distribusi Balai PAM Banjarbakula
33	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	dok	110	Sub Bagian Tata Usaha Balai PAM Banjarbakula
34	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan dan aset BPAM Banjarbakula	Jumlah dokumen keuangan secara berkala	dok	4	
35	Menyusun perencanaan dan pelaporan kinerja BPAM Banjarbakula	Jumlah dokumen laporan kinerja	dok	12	
36	Menyusun Renja BPAM Banjarbakula	Jumlah dokumen renja BPAM Banjarbaakula	dok	1	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

LAKIP Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan merupakan LAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0106 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penyusunannya ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan, antara lain pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diukur kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Metode seperti ini sangat bermanfaat dalam upaya memberikan gambaran kepada pihak lain tentang pelaksanaan upaya organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
III	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
IV	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
V	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
VI	Kurang dari 50%	Kurang

1. Sasaran RPJMD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan turut mendukung Sasaran Pembangunan Kalimantan Selatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	65,58%	80,30	122,4%
2	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian	Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis	78,10%	56,04	71,8%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan data capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar	59,68	74,09	65,58%	80,30	122,4%
2	Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis	38,47	43,86	78,10%	50,64	71,8%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar (IID)

Realisasi pencapaian indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar (IID) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 sebesar 80,30% dari target 65,58%, sehingga persentase capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 122,40% atau telah melampaui target dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis (FIS)

Realisasi indikator Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis (FIS) pada tahun 2018 sebesar 56,04% dari target 78,1% sehingga persentase capaian indikator pada tahun 2018 sebesar 71,80% atau tidak sesuai dari target yang telah ditetapkan pada RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar (IID)

Realisasi indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar (IID) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 6,21%. Dimana realisasi tahun 2017 sebesar 74,09% menjadi 80,30% pada tahun 2018.

b. Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis (FIS)

Realisasi indikator Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis (FIS) pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,18% dari tahun sebelumnya. Dimana realisasi pada tahun 2017 sebesar 43,86% dan pada tahun 2018 sebesar 56,04%.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

a. Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar (IID)

Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar (IID) merupakan indikator mengenai pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi beberapa unsur, yaitu: ketersediaan air minum, ketersediaan prasarana sanitasi, ketersediaan listrik masyarakat, dan ketersediaan telekomunikasi. Unsur-unsur tersebut didapatkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di indikator ini yaitu pada sektor Cipta Karya terkait cakupan air minum dan cakupan sanitasi .

Kenaikan capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar (IID) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 dikarenakan adanya peningkatan target capaian air minum dan sanitasi. Dengan melaksanakan kegiatan yang telah dijadikan prioritas baik dari Daerah maupun Nasional Gerakan 100-0-100 terus diupayakan secara intens. Selain itu peningkatan target Rasio Elektrifikasi dan Telekomunikasi dapat menjangkau pada daerah-daerah terpencil. Menggunakan anggaran APBD Kab/Kota dan APBN disertai dukungan dari APBD Provinsi diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang secara alami harus didapatkan.

b. Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis (FIS)

Indikator Persentase Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Strategis merupakan indikator yang dimana arah pembangunan infrastruktur adalah untuk mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian yang meliputi beberapa unsur, yaitu : ketersediaan sarana prasarana konektivitas antar wilayah, ketersediaan tampungan air dan ketersediaan pembangkit listrik yang memadai. Unsur-unsur tersebut didapatkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perhubungan, SPAM dan Instansi vertikal serta BUMN.

Adapun peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan di indikator ini yaitu pada sektor Bina Marga terkait jalan jembatan strategis daerah, sektor Sumber Daya Air terkait tampungan air dan bendungan besar yang menjadi strategis daerah, serta sektor Cipta Karya terkait penyelesaian SPAM Regional Banjarbakula.

Kenaikan capaian Persentase Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Startegis (FIS) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 yang tidak sesuai target dikarenakan progres pembangunan yang lambat pada beberapa infrastruktur strategis.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2018, adapun program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung terlaksananya kinerja Pemerintah Provinsi antara lain:

a. Bidang Bina Marga

1) Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan Jalan Anjir Pasar – Marabahan
- Peningkatan Jalan Batulicin – Mekarsari – Mentewe
- Peningkatan Jalan Tanjung Serdang - Lontar

b. Bidang Sumber Daya Air

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Embung
- Pembangunan Embung

c. Bidang Cipta Karya

- 1) Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah
 - Sosialisasi dan Pelatihan Air Minum dan PLP
 - Pengadaan dan Pemasangan Pipa ME
 - Perbaikan Sarana dan Prasarana WC/KM Masyarakat
 - Pengembangan SPAM Regional Banjarbakula

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik	22,80%	26,51%	116,28%
		2. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan	51,00%	53,38%	104,67%
		3. Persentase Jumlah Tampungan embung, situ, waduk, yang dibangun	50,00%	47,76%	95,52%
		4. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	64,00%	72,54%	113,34%
		5. Persentase Penyediaan Prasarana air baku	31%	13%	41,94%
2	Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang terintegrasi dan berkualitas yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	1. Jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	87%	77,57%	89,16%
		2. Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (%)	83,5%	80,55%	96,47%
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	82,4%	74,68%	90,63%
		2. Cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai	44,12%	72,46%	164,23%
4	Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur	Jumlah sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik			
		- Publik	5 Unit (86,1%)	5 Unit 86,1%	100%
		- Aparatur	4 Unit (83%)	4 Unit 83%	100%

5	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang daerah	1. Presentase kesesuaian ruang	100%	80,5%	80,5%
		2. Persentase penetapan produk hukum penataan ruang	4	10%	10%
6	Meningkatnya kemampuan SDM baik laki- laki maupun perempuan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi	Persentase kenaikan jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi serta memiliki sertifikat terampil	2%	1,5%	75%
7	Meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi penguji mutu konstruksi	Persentase pelayanan pemohon pengujian yang dapat dilayani dengan sarana dan prasarana yang ada	100%	128,86%	128,86%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan data capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	1. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik	10,1%	15,7%	22,80%	26,51%	116,28%
	2. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan	7%	25,68%	51,00%	53,38%	104,67%
	3. Persentase Jumlah Tampungan embung, situ, waduk, yang dibangun	20%	32,76%	50,00%	47,76%	95,52%
	4. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,4%	19,57%	64,00%	72,54%	113,34%
	5. Persentase Penyediaan Prasarana air baku	13%	13%	31%	13%	41,94%
2	1. Jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	92,76%	71,71%	87%	77,57%	89,16%

	2. Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (%)	82,67%	82,67%	83,5%	80,55%	96,47%
3	1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	74,09%	74,68%	82,4%	74,68%	90,63%
	2. Cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai	30,99%	36,99%	44,12%	72,46%	164,23%
4	Jumlah sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik					
	- Publik	116,6%	80,55%	5 Unit (86,1%)	86,1%	100%
	- Aparatur	39,9%	68,08%	4 Unit (83%)	83%	100%
5	1. Presentase kesesuaian ruang	*	80%	100%	80,5%	80,5%
	2. Persentase penetapan produk hukum penataan ruang	0%	4	4	10%	10%
6	Persentase kenaikan jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi serta memiliki sertifikat terampil	-	2%	1,5%	2%	75%
7	Persentase pelayanan pemohon pengujian yang dapat dilayani dengan sarana dan prasarana yang ada	100%	105,2%	100%	128,86%	128,86%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan realisasi kinerja regional Kalimantan adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Perbandingan				
		Kalsel	Kalteng	Kaltim	Kaltara	Kalbar
1	Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik	22,80%	*	*	*	46,16%
2	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)	79,63%	66,60%	51,60%	11,38%	83,54%
3	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	74,68%	57,02%	*	*	54,60%
4	Cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai	74,62%	35,40%	*	*	*
5	Jumlah sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik	- publik 86,1% - aparatur 83%	*	*	*	33,57%

Dari tabel diatas dapat terlihat perbedaan capaian kinerja beberapa indikator di Provinsi Kalimantan Selatan di regional Kalimantan, adapun beberapa indikator tidak bisa dibandingkan dikarenakan di beberapa provinsi regional Kalimantan tidak memiliki indikator yang sama.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target SDG'S adalah sebagai berikut:

No	Indikator	Perbandingan	
		Kalsel	Target SDG'S
1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman	74,68%	92%
2	Persentase Jumlah Tampungan embung, situ, waduk, yang dibangun	50%	97,08 m3/12,78 detik

5. Perbandingan Realisasi dengan Target

c. Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab atas sasaran strategis Meningkatkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air. Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran diatas, ada lima indikator, antara lain:

- Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik

Persentase luas jaringan irigasi dalam kondisi baik meliputi kegiatan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan dengan target pada tahun 2018 direncanakan naik sebesar 22,8 % dan dalam pelaksanaannya realisasinya sebesar 26,51%, sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sudah melampaui target sebesar 116,28%.

- Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan

Pencapaian indikator persentase luas jaringan irigasi/rawa yang dikembangkan sampai dengan akhir 2018 terealisasi sebesar 53,38% dengan dari target rencana 51%, dimana capaian kinerja indikator tersebut pada tahun 2018 sebesar 104,67%.

- Persentase Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun

Pada tahun 2018 dilakukan Pembangunan Embung Landasan Ulin dengan capaian kinerja 47,76% atau realisasi 95,52% dari target 50% .

- Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air

Tahun 2018 direncanakan target pelaksanaan 64 % dengan kegiatan meliputi normalisasi sungai. Realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 72,54 % yang berarti persentase capaian telah melebihi target sebesar 113,34%.

- Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku

Realisasi pelaksanaan koordinasi penyediaan air baku Banjar-Bakula sebesar 13 % dari target 31% dengan capaian kinerja hanya sebesar 41,94%

- d. Bidang Bina Marga bertanggung jawab atas sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Jalan/ Jembatan yang terintegrasi dan berkualitas yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.

Ada beberapa indikator untuk mendukung sasaran diatas, yaitu:

- Jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)

Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 telah mencapai realisasi sebesar 77,57% dengan target 87% dimana Bidang Bina Marga melaksanakan Pembangunan Jalan sepanjang 16,02 Km.

- Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (%)

Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 hanya terealisasi sebesar 80,55% dari target 83% dengan pembangunan jembatan sepanjang 100 m.

- e. Bidang Cipta Karya adalah salah satu bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bertanggung jawab atas sasaran strategis Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman yang Mencakup Air Minum dan Sanitasi dan Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur. Untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi didukung oleh beberapa indikator, antara lain:

- Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman (%)

Untuk 2018 total capaian menjadi 74,68 % dari target 82,4% di tahun 2018.

- Persentase Cakupan Pelayanan air limbah domestik yang memadai (%)

Provinsi Kalimantan Selatan di Tahun 2018 kapasitas total capaian air limbah menjadi 72,46% ditahun 2018 dari target 44,12% .

Sedangkan untuk mengukur sasaran strategis /strategis Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur, bidang Cipta Karya didukung oleh indikator:

- Jumlah sarana dan prasarana publik dan aparatur perkantoran dalam kondisi baik

Jumlah sarana dan prasarana publik telah berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,1% begitu juga untuk jumlah sarana dan prasarana aparatur sudah mencapai target kinerja sebesar 83% terealisasi sebesar 83%.

d. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

mempunyai peranan dalam mendukung sasaran strategis Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang daerah. Sasaran ini diukur menggunakan indikator :

- Persentase kesesuaian ruang

Persentase kesesuaian ruang tahun 2018 mampu terealisasi 80,5% dari target 100%.

- Persentase Penetapan Produk Hukum Penataan Ruang.

Persentase penetapan produk hukum penataan ruang terealisasi sebesar 10% dari target 4 dokumen produk hukum.

e. Untuk mendukung dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kemampuan SDM baik laki – laki maupun perempuan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi, bidang Bina Konstruksi mempunyai indikator yaitu

- Jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi serta memiliki sertifikat terampil

Dengan target 2% jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi serta memiliki sertifikat terampil, bidang Bina Konstruksi berhasil melaksanakan pemberdayaan kepada 110 orang atau realisasi 75%.

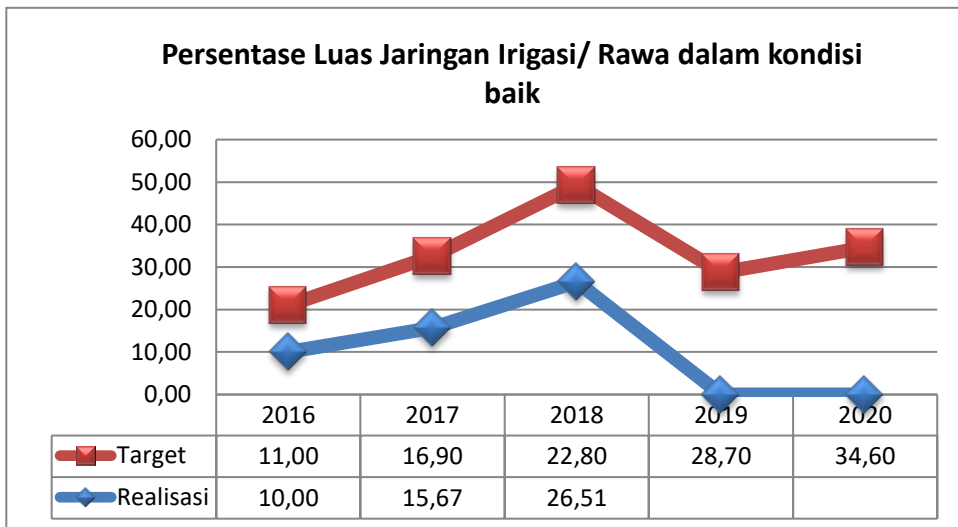
f. Dalam mendukung sasaran strategis meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi penguji mutu konstruksi, Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai indikator yaitu :

- Persentase pelayanan pemohon pengujian yang dapat dilayani dengan sarana dan prasarana yang ada

Pada tahun 2018 Laboratorium Bahan Konstruksi telah berhasil mencapai target yaitu 350 pengguna jasa uji dengan realisasi 128,86% dengan jumlah realisasi 451 orang pengguna jasa uji.

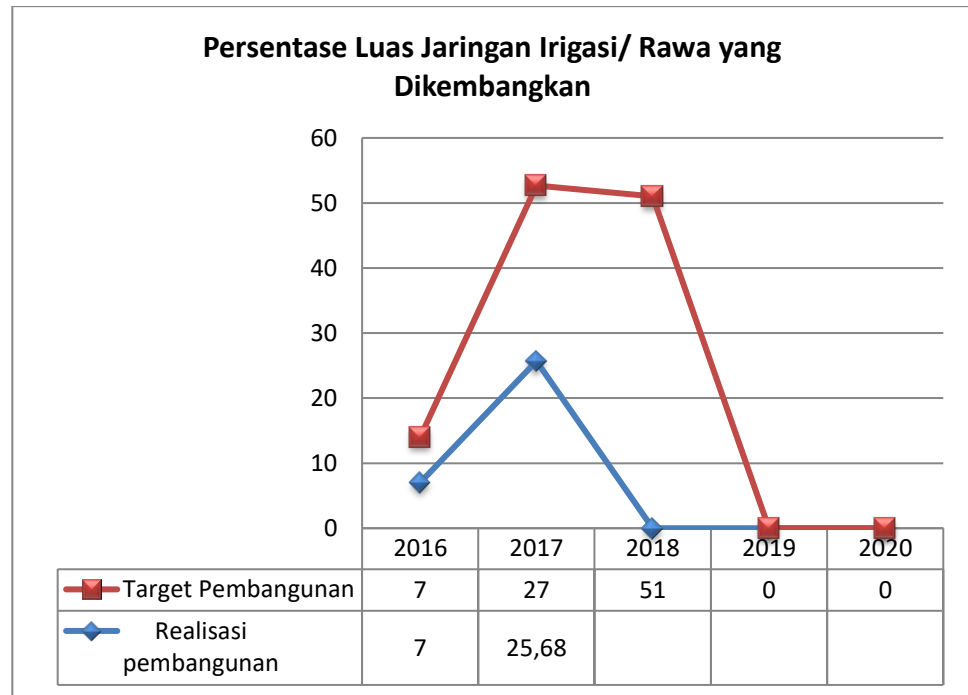
6. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Bidang Sumber Daya Air
- Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik



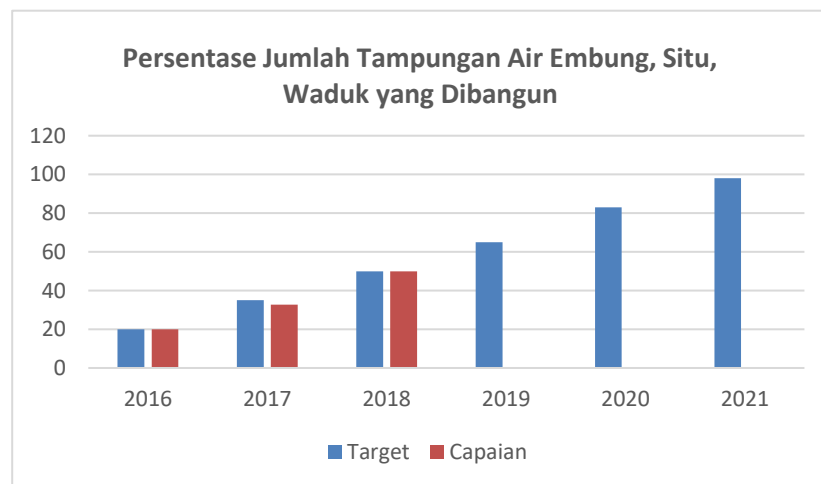
Pada tahun 2018, persentase luas jaringan irigasi dalam kondisi baik terus mengalami peningkatan dengan realisasi 116,28 % dibandingkan tahun 2016 dengan realisasi 91,8% dan tahun 2017 hanya sebesar 92,9%.

- Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan



Realisasi luas jaringan irigasi yang dikembangkan pada tahun 2018 yaitu 104,67% yang artinya juga terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan capaian 91,8% dan tahun 2017 dengan capaian sebesar 95,13%.

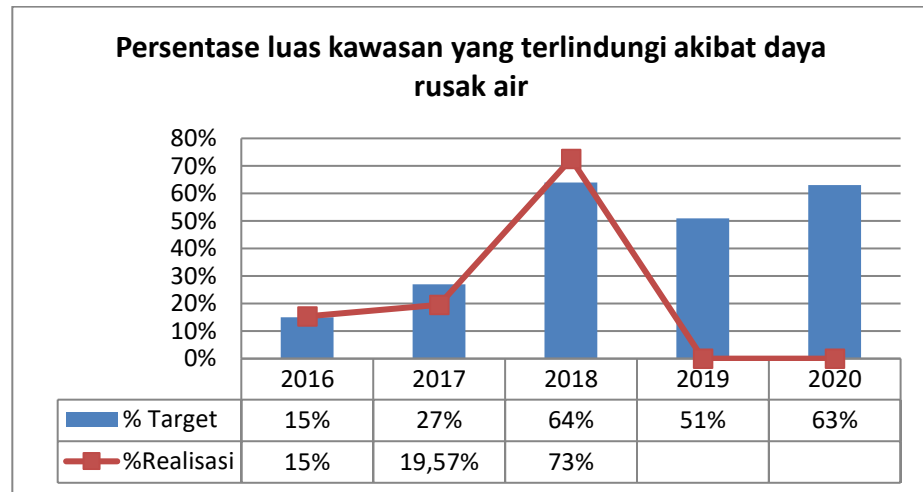
- Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun



Target pembangunan embung selama periode 2016 -2021 adalah sebanyak 3 buah embung. Tahun 2016 - 2018 direncanakan Pembangunan Embung Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Persentase realisasi target pelaksanaan tahun 2016 terpenuhi sesuai yang direncanakan yaitu sebesar 20 %.

Pada tahun 2017 dilakukan Pembangunan Embung Landasan Ulin 1 Buah dalam rangka kawasan resapan di kota banjarbaru dengan realisasi sebesar 32,76 % dari target 35% dan pada tahun 2018 dengan realisasi 50% dari target 50% dimana indikator ini dapat dikatakan sudah mencapai target.

- Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air

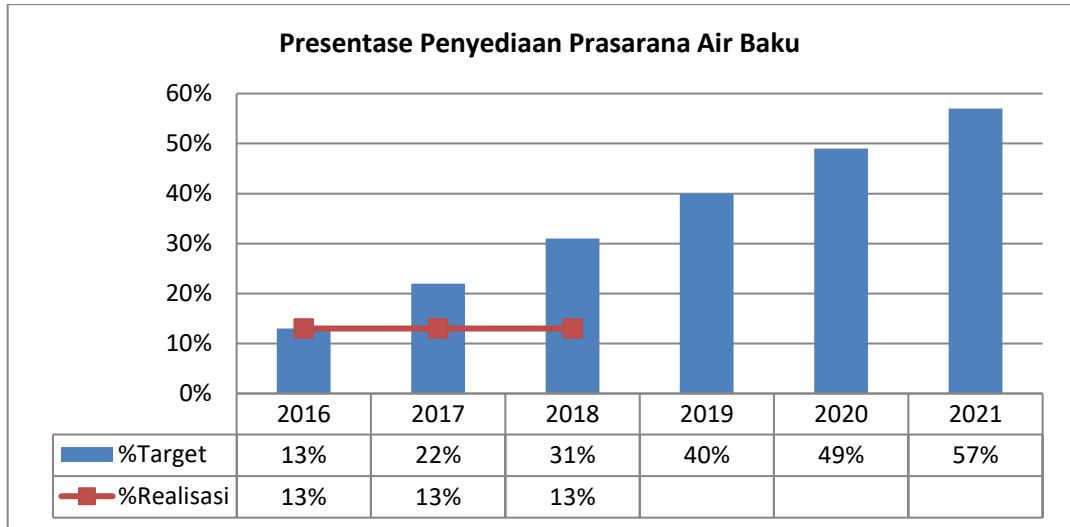


Tahun 2018 direncanakan target pelaksanaan 64% meliputi kegiatan Normalisasi Sungai di Kabupaten Tanah Bumbu dengan persentase realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 72,54 % atau melebihi target dengan capaian 113.34%.

Tahun 2017 direncanakan target pelaksanaan 27 % meliputi kegiatan Normalisasi Sungai Setarap Kabupaten Tanah Bumbu dengan persentase realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 19,57 %.

Tahun 2016 realisasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai Setarap Kabupaten Tanah Bumbu dan penyelesaian Normalisasi Pengendalian Banjir Sungai Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 10 % dengan luas kawasan yang terlindungi 750 ha.

- Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku

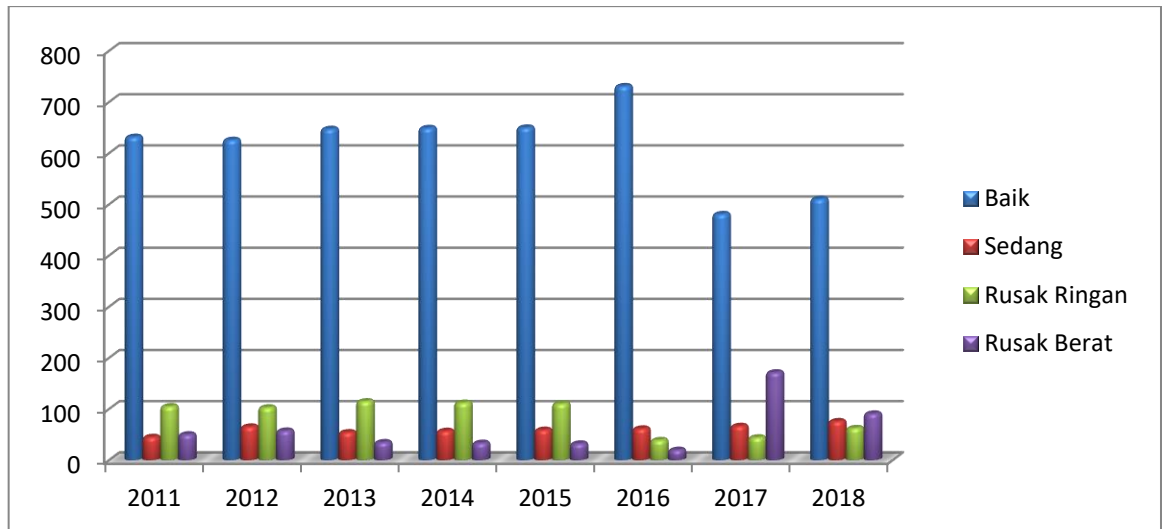


Realisasi pelaksanaan koordinasi penyediaan air baku Banjar-Bakula pada tahun 2018 dan 2017 sebesar 13 % terpenuhi sesuai target melalui kegiatan penyelesaian pembangunan intake air baku Banjar-Bakula dengan menggunakan dana APBN yang dilaksanakan oleh BWSK II.

Pada tahun 2016 Realisasi pelaksanaan koordinasi penyediaan air baku Banjar-Bakula sebesar 13 % terpenuhi sesuai target melalui kegiatan penyelesaian pembangunan intake air baku Banjar-Bakula.

- Bidang Bina Marga
 - Jalan dalam kondisi baik dan sedang (%)

Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2011 - 2018



Realisasi capaian kinerja indikator persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sebenarnya terus mengalami peningkatan, kondisi diatas terjadi karena adanya perubahan ruas jalan sesuai SK Gubernur .

Jalan dalam kondisi baik dan sedang atau mantap provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi persentasenya dibandingkan provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

- Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (%)

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Presentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	81%	81%	82.39%	82.90%	83.25%	92.76%	82,67%	80,55%

Persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 sebenarnya terus mengalami peningkatan, kondisi diatas terjadi karena adanya perubahan ruas jalan sesuai SK Gubernur.

- Bidang Cipta Karya
 - Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman (%)

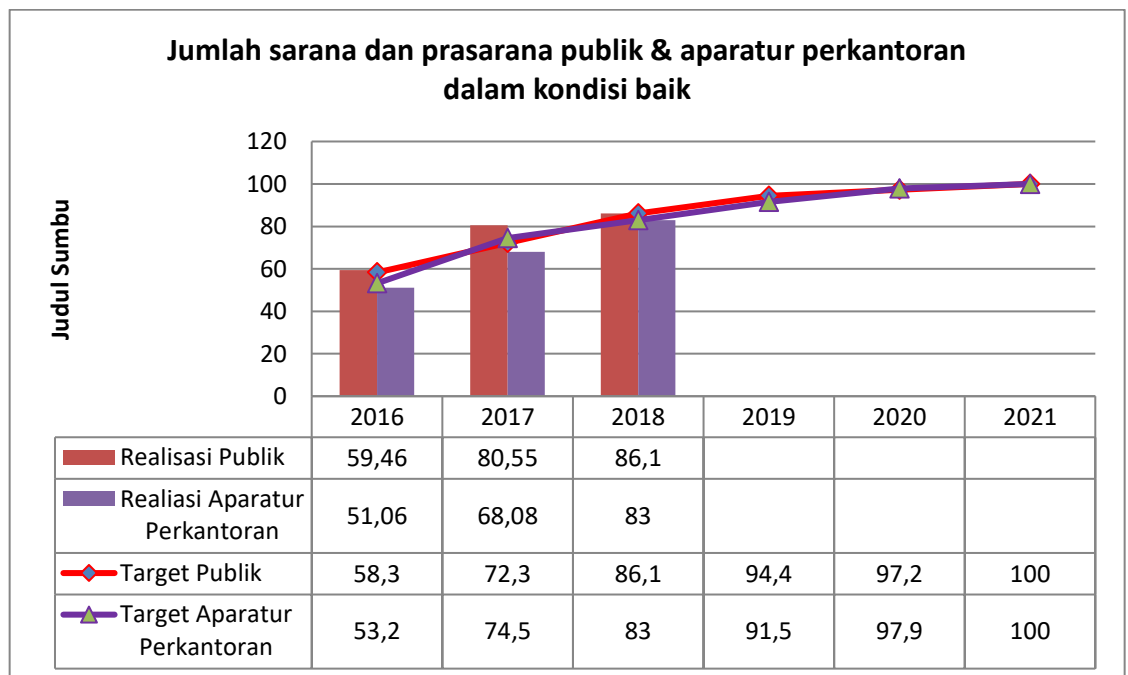
Capaian akses air minum meningkat 1,137 % yang tadinya di 2016 capaiannya adalah 73,54 % menjadi 74,68 % di tahun 2017 begitupun tahun 2018. Capaian akses air minum Kalimantan Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan capaian akses air minum provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

- Persentase Cakupan Pelayanan air limbah domestik yang memadai (%)

Capaian pelayanan sanitasi meningkat sebesar 2,55% yaitu menjadi 36,99% ditahun 2017 dan 72,46% tahun 2018 yang tadinya 30,99% ditahun 2016.

Sedangkan untuk mengukur sasaran strategis / kinerja utama IV yaitu Meningkatkan Infrastruktur Publik dan Aparatur, bidang Cipta Karya didukung oleh indikator:

- Jumlah sarana dan prasarana publik & aparatur perkantoran dalam kondisi baik



Jumlah sarana dan prasarana publik telah berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 80,55% pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,3% dan mengalami peningkatan sebesar 21,09% dari tahun 2016 dengan capaian sebesar 59,46%. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana

aparatur belum mencapai target kinerja sebesar 74,5% hanya terealisasi sebesar 68,08% tetapi mengalami peningkatan realisasi sebesar 17,02% dari tahun 2016 dengan capaian 51,06%.

Jumlah sarana dan prasarana publik berhasil mencapai target 86,1% dengan persentase capaian 100% dan jumlah sarana dan prasarana aparatur juga telah berhasil mencapai target 83% dengan persentase capaian 100%.

Indikator kinerja Jumlah sarana dan prasarana publik & aparatur perkantoran dalam kondisi baik di Provinsi Kalimantan Selatan lebih tinggi persentasenya dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat.

- Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Indikator kinerja Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan baru yaitu persentase kesesuaian ruang telah tercapai 80% pada tahun 2017 dan 80,5 % pada tahun 2018 dari target 100%. Indikator kinerja persentase penetapan produk hukum penetapan ruang telah tercapai 10% di tahun 2018 .

- Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi dengan indikator persentase kenaikan jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi serta memiliki sertifikat terampil dengan target 2% telah terealisasi 1,5% sebesar 110 orang.

- Laboratorium Bahan Konstruksi

- Persentase pelayanan pemohon pengujian yang dapat dilayani dengan sarana dan prasarana yang ada

Tahun 2016 dan 2017 Laboratorium Bahan Konstruksi telah berhasil mencapai target dengan realisasi 100%. Pada tahun 2016 pengguna jasa uji sebanyak 403 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 309 orang.

Sedangkan pada tahun 2018 telah terealisasi sebesar 451 pengguna jasa uji dari target 300 pengguna jasa uji. Persentase capaian kinerja sebesar 150%.

7. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

- Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab atas sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Hal ini berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai.

Sasaran Bidang Sumber Daya Air diatas dalam rangka mendukung RPJMD Kalsel Tahun 2016 - 2021 berupa Kalsel Infrastruktur berkualitas, Kalsel Sentra Pangan, Kalsel lingkungan berkualitas. Selama periode RPJMD (lima) tahun terakhir hingga tahun 2017 telah dilaksanakan program Pengelolaan Sumber Daya Air, terutama pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Sasaran ini diukur dari aspek Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik pengelolaan irigasi yang meliputi kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi guna meningkatkan, mempertahankan dan memperbaiki kinerja pelayanan jaringan irigasi dalam memenuhi kebutuhan air irigasi, baik pada irigasi gravitasi maupun irigasi rawa

1. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik

Pada target tahun 2018 direncanakan sebesar 22,8 % dalam pelaksanaannya, realisasi mencapai 26,51 %, terjadi peningkatan capain 3,71 % dari rencana awal. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan anggaran dari dana DAK yang di dapat. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Peningkatan DIR. Polder Bakar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melaksanakan pekerjaan lining saluran, Rehabilitasi DIR. Tanggul Lungau Kabupaten hulu Sungai Selatan dengan item pekerjaan perkuatan tebing dan tanggul, rehabilitasi saluran pada DIR. Danda Besar Kabupaten Barito Kuala dan rehabilitasi bendung DI. Intangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan total luasan 708,61 Ha.

Sedangkan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi/Rawa kewenangan Provinsi dilakukan pada 4 Daerah Irigasi sepanjang 29,25 km dan 4 Daerah Irigasi Rawa sepanjang 71,41 km.

2. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan

Rencana dan realisasi pelaksanaan pengembangan daerah irigasi teknis baru yang menjadi program Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dalam mendukung ketahanan pangan yaitu Pembangunan Jaringan Irigasi Kinarum 1.004 ha Kabupaten Tabalong. Sampai dengan akhir 2018 capaian kinerja mengalami peningkatan, dari target rencana 51 %, dimana realisasi pembangunan jaringan irigasi kinarum adalah sebesar 54,91 %, dengan outcome seluas 150 Ha meliputi pekerjaan pembangunan jaringan primer. Peningkatan kinerja dikarenakan adanya Dana sisa tahun 2017 *mandatorie budget* dikarenakan faktor kendala cuaca pada tahun 2017 sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan 100 %. Kegiatan pembangunan daerah irigasi adalah merupakan program penambahan luas areal pertanian beririgasi teknis / ekstensifikasi lahan pertanian baru dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Diharapkan dengan adanya pembangunan jaringan irigasi baru dapat menambah lokasi areal irigasi teknis baru serta menyediakan sarana prasarana infrastruktur jaringan irigasi teknis untuk cetak sawah yang menjadi program pertanian.

3. Persentase Jumlah Tampungan embung, situ, waduk, yang dibangun

Capaian kinerja pembangunan embung yang menjadi target pemerintah provinsi sesuai dengan target yang ingin dicapai yaitu sebesar 100 %. Pembangunan Embung Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilakukan Pada anggaran tahun 2017 untuk pekerjaan galian dan bangunan outlet sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 untuk pembuatan bangunan inlet embung.

4. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air

Tahun 2018 direncanakan target pelaksanaan sebesar 39 % meliputi kegiatan Normalisasi Sungai – Sungai kawasan WS. Cengal Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang 4 km. Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 53,77 % dengan normalisasi sungai sepanjang 14,2 km. Capaian kinerja mengalami peningkatan dikarenakan dengan jumlah anggaran yang didapat terdapat perubahan pelaksanaan lokasi pekerjaan sehingga dapat mengoptimalkan anggaran yang ada.

5. Persentase Penyediaan Prasarana air baku

Rencana dan realisasi pelaksanaan penyediaan prasarana air baku yang menjadi program Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 dalam kegiatan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana air baku Kawasan Strategis Banjar-Bakula merupakan kegiatan strategis provinsi yang meliputi Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin dan Kab. Tanah Laut, kegiatannya yaitu penyelesaian intake Riam Kanan dengan Dana APBN melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, realisasi pelaksanaan koordinasi penyediaan air baku Banjar-Bakula sebesar 13 % terpenuhi sesuai target melalui kegiatan penyelesaian pembangunan intake air baku Banjar-Bakula dengan menggunakan dana APBN yang dilaksanakan oleh BWSK II.

Beberapa langkah strategis bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung capaian sasaran strategis diatas, yaitu :

1. Mendukung kedaulatan pangan dengan merehabilitasi dan peningkatan serta operasi dan pemeliharaan jaringan pada 7 lokasi di Daerah Irigasi dan 29 lokasi di Daerah Irigasi Rawa dalam kondisi baik dan mendukung kedaulatan pangan dengan pengembangan Daerah Irigasi Baru (DI. Kinarum Kabupaten Tabalong seluas 1.004 ha). Untuk mendukung kegiatan ini selain dari sumber dana APBD juga diusulkan pelaksanaan kegiatannya melalui sumber dana DAK.
2. Mengurangi dampak daya rusak air melalui kegiatan :
 - a. Normalisasi Jempana (DAS Satui) Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 11,7 km.
 - b. Normalisasi Sungai - Sungai WS Cengal Batu Licin Ruas Sungai Antasan 1 Satiung - Saring Sei Binjai Desa Satiung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu sepanjang 800 m.
 - c. Normalisasi Sungai - Sungai WS Cengal Batu Licin Ruas Sungai Antasan 2 Karya Bakti - Pulau Tanjung Desa Satiung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu sepanjang 1.700 m.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan pengelolaan data dan informasi SDA (dengan pengadaan 2 buah alat hidrologi) dengan melakukan kegiatan monitoring dan pemeliharaan alat di WS. Cengal

Batulicin. Kegiatan ini untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Air WS. Cengal-Batulicin.

4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pengelola SDA melalui kegiatan Pertemuan, Studi Banding dan Sidang Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018.

- Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga selaku unsur lini bagian dari perangkat dinas bertugas membangun dan memelihara (rehabilitasi) jaringan jalan dan jembatan, yang memberikan dampak baik dengan bertambahnya panjang jalan sebagai aset negara/daerah, serta dipertahankannya kondisi jalan yang ada melalui tahapan, secara langsung dirasakan masyarakat dengan nyaman, lancar dan aman selaku pengguna jalan. Bidang Bina Marga bertanggung jawab atas sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Transportasi (Jalan/ Jembatan) yang Berkualitas.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0462/KUM/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0320/KUM/2012 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan, panjang jalan Provinsi di wilayah Kalimantan Selatan yaitu 762,61 km berkurang 89,3 km dari sebelumnya dan panjang jalan Nasional sesuai Keputusan Menteri PU Nomor 248/KPTS/M/2015, di wilayah Kalimantan Selatan adalah 811,40 km.

Pada tahun 2018 ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/030/KUM/2018 perubahan kelima atas keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2032 yang semula 762,61 km menjadi 756,12 km sehingga terjadi penurunan sebesar 6,49 KM.

Bidang Bina Marga bertanggung jawab atas sasaran strategis Meningkatnya Infrastruktur Transportasi (Jalan/ Jembatan) yang Berkualitas. Sasaran ini diukur menggunakan indikator persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang (%) dan persentase jembatan dalam kondisi baik dan sedang (%).

Pada tahun 2018 Bidang Bina Marga melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 36,5 km dan pembangunan jembatan sepanjang 100 m, sehingga pada akhir tahun 2018 tingkat kemantapan jalan provinsi menjadi 77,57 % dan kemantapan Jembatan sebesar 80,55%

Bidang Bina Marga dengan dua indikator kinerja utama jalan dalam kondisibaik dan sedang (%) dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang (%) telah tercapai di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 karena terjadi perubahan ruas jalan dan jembatan sesuai Surat Keputusan Gubernur tahun 2018 tentang jalan dan jembatan provinsi.

Dua indikator ini pada Tahun 2018 telah mencapai target dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini akan dipertahankan untuk mencapai target ruas jalan mantap ditahun 2021 sesuai target dari Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Upaya atau rencana aksi yang dilakukan di tahun mendatang untuk mencapai target selanjutnya adalah dengan membuat skala prioritas program/kegiatan dan tentu dengan adanya dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

- Bidang Cipta Karya

- Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman (%)

Capaian akses air minum meningkat 1,137 % yang tadinya di 2016 capaiannya adalah 73,54 % menjadi 74,68 % di tahun 2017 dan di tahun 2018.

- Persentase Cakupan Pelayanan air limbah domestik yang memadai (%)

Capaian pelayanan sanitasi meningkat sebesar 2,55% yaitu menjadi 36,99% ditahun 2017 dan 72,46% ditahun 2018 yang tadinya 30,99% ditahun 2016.

- Jumlah sarana dan prasarana publik & aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN

Jumlah sarana dan prasarana publik telah berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 80,55% pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,3% dan mengalami peningkatan sebesar 21,09% dari tahun 2016 dengan capaian sebesar 59,46%. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana aparatur belum mencapai target kinerja sebesar 74,5% hanya terealisasi

sebesar 68,08% tetapi mengalami peningkatan realisasi sebesar 17,02% dari tahun 2016 dengan capaian 51,06%.

Pada tahun 2017 Bidang Cipta Karya melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik antara lain: Sayembara Tugu Nol dan Masjid Agung, Restorasi Jamban Terapung, Perbaikan Lapangan Masjid Raya Sabial, Pembangunan taman edukasi lalu lintas dan perencanaan penataan penghijauan dan taman di kawasan Kantor Gubernur.

Sedangkan pada tahun 2018 Jumlah sarana dan prasarana publik telah berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 86,1% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,1% dan mengalami peningkatan sebesar 5,55% dari tahun 2017 dengan capaian sebesar 100%. Jumlah sarana dan prasarana aparatur juga telah mencapai target kinerja sebesar 83% terealisasi sebesar 83% dan mengalami peningkatan realisasi sebesar 14,92% dari tahun 2017 dengan capaian 100%.

Pada tahun 2018 Bidang Cipta Karya melakukan pembangunan sarana dan prasarana publik antara lain: Perencanaan Rehab Gedung Pramuka di Banjarmasin, Pembangunan WC Umum di Pondok Pesantren Al Falah, Masterplan Istana Mahligai Rakyat, Sayembara Masjid Bambu, Pembangunan Fasilitas Air Bersih Desa Bangun Rabah dan Desa Jejangkit (Batola), Rehabilitasi Atap Makam Hasan Basri, dan lain sebagainya.

- Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Sasaran Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang daerah ini diukur menggunakan indikator persentase kesesuaian ruang dan persentase penataan produk hukum penataan ruang. Pada tahun 2018, 80,5% pemanfaatan ruang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Pada tahun anggaran tahun 2019, RTRW Provinsi Kalimantan Selatan akan peninjauan kembali, selama 5 tahun ke belakang akan dilihat kesesuaian dengan rencana tata ruang yang sudah ada dalam Perda No. 9 Tahun 2015.

- Bidang Bina Konstruksi

Sasaran Meningkatnya Jumlah SDM yang Kompeten dan Pengendalian Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sasaran diukur dengan menggunakan indikator Jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang konstruksi serta memiliki sertifikat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Dari Jumlah 1.789 Tenaga Ahli Kompeten pada Tahun 2018 dan 4.446 Tenaga Teknik Terampil direncanakan meningkat pada tahun 2019 menjadi 1.804 Tenaga Ahli Kompeten dan 4.535 Tenaga Teknik Terampil atau meningkat sebanyak 2% tenaga ahli kompeten dan 11.47% Tenaga Teknik terampil yang bersumber dari dana APBD Prov. Kalsel maupun pendanaan lainnya.

Melalui Mobile Training Unit (MTU) I Mobil Pelatihan Konstruksi Keliling diharapkan dapat memperluas akses pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja konstruksi di kantong-kantong tenaga kerja konstruksi dan pusat-pusat lokasi proyek yang belum terjangkau.

Sesuai kewenangan provinsi melalui Bina Konstruksi sebagai penyelenggara Sistem Informasi Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI) yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses informasi usaha jasa konstruksi dan membantu memperkuat jaringan bisnis pelaku usaha dalam rantai pasok konstruksi.

- Laboratorium Bahan Konstruksi
- Persentase pelayanan pemohon pengujian yang dapat dilayani dengan sarana dan prasarana yang ada

Pada tahun 2018 Laboratorium Bahan Konstruksi telah berhasil merealisasikan pengguna jasa uji sebanyak 451 dari target 350 pengguna jasa uji.

8. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak lepas dari dukungan program dan kegiatan yang terlaksana pada tahun 2018, adapun program dan kegiatan tersebut antara lain:

- d. Bidang Bina Marga
 - 2) Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Sumber Daya Air
 - 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- f. Bidang Cipta Karya
 - 2) Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah
- g. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
 - 1) Program Penataan Ruang
 - 2) Program Perencanaan Tata Ruang
 - 3) Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan
- h. Bidang Bina Konstruksi
 - 1) Program Pengaturan Jasa Kontruksi

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air

Capaian Kinerja Bidang Sumber Daya Air dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik	5,90%	10,81%	183,24%
		2. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan	24,00%	27,70%	115,43%
		3. Persentase Jumlah Tampungan embung, situ, waduk, yang dibangun	15,00%	15,00%	100,00%
		4. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	12,00%	27,30%	227,50%
		5. Persentase Penyediaan Prasarana air baku	9,00%	0,00%	0,00%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan data capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	1. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik	10,10	15,7	5,90%	10,81%	183,24%
	2. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan	7,00	25,68	24,00%	27,70%	115,43%
	3. Persentase Jumlah Tampungan embung, situ, waduk, yang dibangun	20,00	32,76	15,00%	15,00%	100,00%
	4. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	15,40	19,60	12,00%	27,30%	227,50%
	5. Persentase Penyediaan Prasarana air baku	13,00	13,00	9,00%	0,00%	0,00%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Persentase luas jaringan irigasi/ rawa dalam kondisi baik
Persentase luas jaringan irigasi dalam kondisi baik meliputi kegiatan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan dengan target tahun 2018 direncanakan sebesar 5,90 %, dan dalam pelaksanaannya realisasi nya mencapai 10,81 %. Capaian kinerja sebesar 183,24 %.
- Persentase luas jaringan irigasi/ rawa yang dikembangkan
Sampai dengan akhir 2018 target rencana sebesar 24 %, dalam pelaksanaannya realisasi sebesar 27,70 % sehingga capaian kinerja sebesar 115,43 % dengan kegiatan meliputi pembangunan daerah irigasi baru.
- Persentase jumlah tampungan air embung, situ waduk yang dibangun
Sampai dengan akhir 2018 target rencana sebesar 15,00 % dengan realisasi sebesar 15,00 %. Capaian kinerja sebesar 100 % dengan kegiatan meliputi pembangunan embung.
- Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air
Sampai dengan akhir 2018 target rencana sebesar 12,00 % dan dalam pelaksanaannya realisasi sebesar 27,30 %. Capaian kinerja sebesar 227,50 %
- Persentase penyediaan prasarana air baku
Sampai dengan akhir 2018 target rencana sebesar 9,00 %, namun dalam pelaksanaannya realisasi sebesar 0,00 %. Capaian kinerja sebesar 0,00 %, dalam pelaksanaannya bidang sumber daya air sebagai pelaksanaan koordinasi penyediaan air baku Banjar – Bakula.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik
Pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 94,38% dan di tahun 2016 sebesar 91,82% .
- Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan
Pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 93,42% dan di tahun 2016 sebesar 31,5%.
- Persentase Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun
Pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 85,08% dan di tahun 2016 sebesar 100%.

- Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air
Pada tahun 2017 capaian kinerja sebesar 34,76% dan di tahun 2016 sebesar 102,7%.
- Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku
Pada tahun 2016 maupun 2017 dalam pelaksanaannya realisasi sebesar 0,00 %. Capaian kinerja sebesar 0,00 %, dalam pelaksanaannya bidang sumber daya air sebagai pelaksanaan koordinasi penyediaan air baku Banjar – Bakula.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

1. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa Dalam Kondisi Baik

Pada target tahun 2018 direncanakan sebesar 5,9 % (target sampai dengan 2018 sebesar 22,8 %) dalam pelaksanaannya, realisasi mencapai 10,81 % (target sampai dengan 2018 sebesar 26,51 %), terjadi peningkatan capaian 3,71 % dari target awal. Capaian kinerja tahun 2018 sebesar 116,27 % mengalami peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 92,71 %. Hal ini disebabkan karena adanya bantuan anggaran dari dana DAK yang di dapat. Kegiatan yang dilaksanakan berupa Peningkatan DIR. Polder Bakar Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melaksanakan pekerjaan lining saluran, Rehabilitasi DIR. Tanggul Lungau Kabupaten hulu Sungai Selatan dengan item pekerjaan perkuatan tebing dan tanggul, rehabilitasi saluran pada DIR. Danda Besar Kabupaten Barito Kuala dan rehabilitasi bendung DI. Intangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan total luasan 708,61 Ha.

Sedangkan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi/Rawa kewenangan Provinsi dilakukan pada 4 Daerah Irigasi sepanjang 29,25 km dan 16 Daerah Irigasi Rawa sepanjang 71,41 km.

2. Persentase Luas Jaringan Irigasi/ Rawa yang Dikembangkan

Rencana dan realisasi pelaksanaan pengembangan daerah irigasi teknis baru yang menjadi program Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dalam mendukung ketahanan pangan yaitu Pembangunan Jaringan Irigasi Kinarum 1.004 ha Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 104,67 % hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari tahun 2017 yang hanya mendapat 92,71 %. Target rencana tahun 2018 sebesar 24

%(target sampai dengan 2018 sebesar 51 %), dimana realisasi pembangunan jaringan irigasi kinarum adalah sebesar 27,70 % (realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar 53,38 %), dengan outcome seluas 150 Ha meliputi pekerjaan pembangunan jaringan primer. Peningkatan kinerja dikarenakan adanya Dana sisa tahun 2017 mandatorie budget dikarenakan faktor kendala cuaca pada tahun 2017 sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan 100 %. Kegiatan pembangunan daerah irigasi adalah merupakan program penambahan luas areal pertanian beririgasi teknis / ektensifikasi lahan pertanian baru dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Diharapkan dengan adanya pembangunan jaringan irigasi baru dapat menambah lokasi areal irigasi teknis baru serta menyediakan sarana prasarana infrastruktur jaringan irigasi teknis untuk cetak sawah yang menjadi program pertanian.

3. Persentase Jumlah Tampungan embung, situ, waduk, yang dibangun
Dari target rencana 15 % (target sampai dengan 2018 sebesar 50 %), Realisasi tahun 2018 sebesar 15 % (realisasi komulatif sampai dengan tahun 2018 hanya 47,76 %) dikarenakan adanya indikator kinerja yang tidak tercapai di tahun sebelumnya. Pembangunan Embung Landasan Ulin Kota Banjarbaru dilakukan Pada anggaran tahun 2017 untuk pekerjaan galian dan bangunan outlet sedangkan pada Tahun Anggaran 2018 untuk pembuatan bangunan inlet embung. Hal ini menunjukkan Peningkatan Kinerja dari 93,61 % menjadi 95,52 % untuk tahun 2018.

4. Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air
Tahun 2018 direncanakan target pelaksanaan sebesar 12,00 % (target komulatif tahun 2018 sebesar 39 %) meliputi kegiatan Normalisasi Sungai – Sungai kawasan WS. Cengal Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang 4 km. Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar 27,30 % (realisasi sampai dengan tahun 2018 sebesar 46,87 %) dengan normalisasi sungai sepanjang 14,2 km. Capaian kinerja mengalami peningkatan dari 72,48 % di tahun 2017 menjadi 120,18 % di tahun 2018, hal ini dikarenakan dengan jumlah anggaran yang didapat terdapat perubahan pelaksanaan lokasi pekerjaan sehingga dapat mengoptimalkan anggaran yang ada.

5. Persentase Penyediaan Prasarana air baku

Kegiatan persiapan yang dilakukan oleh Bidang SDA untuk menunjang pemenuhan air baku di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu membuat Outline Plan Penyediaan Air Baku Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Pelaksanaan penyediaan prasarana air baku menjadi program Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 meliputi kegiatan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana air baku Kawasan Strategis Banjar-Bakula. Kegiatan ini merupakan kegiatan strategis provinsi di Kab. Banjar, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin dan Kab. Tanah Laut, dimana pengoperasian dan pemeliharaan menggunakan Dana APBN melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan II.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Pencapaian kinerja Kepala Bidang Sumber Daya Air tidak luput didukung oleh para kepala seksi yang ada di bidang SDA yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi					
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Air	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan SDA	9 dok	10 dok	111,11%
Seksi Irigasi dan Air Baku					
2	Pembangunan Daerah Irigasi/Rawa	Panjang dan jumlah bangunan pada jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun	350	404	115,00
3	Pelaksanaan, Peningkatan, Rehabilitasi & OP Daerah Irigasi/Rawa Kewenangan	Jumlah daerah irigasi/ rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara	32 DIR 7 DI 550 m 1 Bendung	16 DIR 4 DI 2.892 m 1 Bendung	183,24
4	Penyediaan prasarana air baku	Panjang & Jumlah jaringan air baku yang dibangun	0,00	0,00	0,00
Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai					
5	Melaksanakan Pembangunan Tampung Air Embung, situ, waduk	Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun	1	1	100,00
6	Melaksanakan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai	Panjang dan Jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi	4 km 2 buah	14,2 km 2 buah	228,00

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan SDA	11 dok	7 dok	9 dok	10 dok	111,11%
2	Panjang dan jumlah bangunan pada jaringan irigasi/rawa yang baru dibangun	250 m	300m	350	404	115,00
3	Jumlah daerah irigasi/ rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara	27 DIR	29 DIR	32 DIR 7 DI 550 m 1 Bendung	16 DIR 4 DI 2.892 m 1 Bendung	183,24
4	Panjang & Jumlah jaringan air baku yang dibangun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun	0	1	1	1	100,00

6	Panjang dan Jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi	30,25 KM	6,4 KM	4 km 2 buah	14,2 km 2 buah	228,00
---	--	----------	--------	----------------	-------------------	--------

Kepala Bidang Sumber Daya Air didukung oleh kepala seksi yang ada di Bidang Sumber Daya Air

a. Seksi Pembinaan Teknis Sungai, Pantai, dan Irigasi

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan

Pada tahun 2018 dari target 9 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 10 dokumen perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dengan capaian kinerja 111,11 %.

2. Perbandingan dengan realisasi terkait

- Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan

Pada tahun 2018 dari target 9 dokumen dapat direalisasikan sebanyak 10 dokumen perencanaan dan pada tahun 2017 dapat direalisasikan sebanyak 7 dokumen perencanaan dan pengelolaan sumber daya air dengan capaian kinerja 70 %.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Terjadi peningkatan capaian kinerja pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dikarenakan terjadi gagal lelang.

a. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Revisi Rancangan Pola Pengelolaan WS Cengal Batulicin
- DED Pengendali Banjir HST-HSS
- Survei Identifikasi dan Evaluasi Jaringan Tersier DI Haruyan Dayak Kab.HST
- DED Rehabilitasi dan Peningkatan Daerah Irigasi Rawa Tanggul Martapura Kabupaten Banjar
- DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Polder Tambak Hanyar Kab. Banjar

- DED Embung Kampung Banjar
- DED dan UPL Embung Kampung Banjar
- Outline Plan Penyediaan Air Baku Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu

b. Seksi Drainase, Sungai, dan Pantai

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun

Pada tahun 2018 rencana dibangun 1 buah embung dan 1 dokumen supervisi dapat direalisasikan 1 buah embung dan 1 dokumen supervisi dengan capaian kinerja 100 % untuk pembangunan embung.

- Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi

Target normalisasi sepanjang 4 km, 2 buah bangunan dan 1 dokumen supervisi. Realisasi normalisasi melebihi target yaitu 14,2 km, 2 buah bangunan buah dan 1 dokumen supervisi. Capaian kinerja untuk kegiatan ini mencapai 100 % terutama pada kegiatan normalisasi yang mencapai 228 %.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun

Pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan kinerja sebesar 24% dibandingkan tahun sebelumnya yang ditargetkan dapat selesai 100 % namun kinerja hanya mencapai 76 % di tahun 2017.

- Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi

Capaian kinerja untuk kegiatan ini pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 dengan capaian kinerja 106,67%.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

- Jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun

Pada tahun 2018 pembangunan embung menunjukkan peningkatan kinerja karena kegiatan ini merupakan kegiatan multiyears sehingga adanya progress kemajuan setiap tahunnya.

- Panjang dan jumlah bangunan pengendali banjir dan pengaman pantai yang dibangun dan direhabilitasi

Capaian kinerja untuk kegiatan ini pada tahun 2018 mengalami peningkatan karena terjadinya perubahan lokasi kegiatan sehingga mampu mengoptimalisasi anggaran.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Pengadaan alat hidrologi (Telemetry) AWLR Intake DI. Haruyan Dayak Kab. HST dan Sungai WS.Cengal Batulicin
- Normalisasi Sungai Jempana (DAS Satui) Kab. Tanah Laut
- Supervisi Normalisasi Sungai Jempana (DAS Satui) Kab. Tanah Laut
- Pembangunan Embung Landasa Ulin Kota Banjarbaru
- Supervisi Pembangunan Embung Landasa Ulin Kota Banjarbaru
- Normalisasi Sungai- Sungai WS.Cengal Batulicin Kab. Tanah Bumbu
- Pemeliharaan Berkala alat hidrologi

c. Seksi Irigasi dan Air Baku

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- Panjang dan jumlah bangunan pada jaringan irigasi/ rawa yang baru dibangun

Target dibangun 350 m saluran primer namun realisasi hanya sepanjang 404 m sedangkan dokumen supervisi rencana sesuai dengan realisasi yaitu 1 buah dokumen supervisi dengan capaian kinerja sebesar 115 % pada tahun 2018 dimana mengalami peningkatan dari tahun 2017 dengan target 500 m dapat direalisasikan sebesar 350 m atau capaian kinerja 70%.

- Jumlah daerah irigasi/ rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara

Pada target Operasi dan pemeliharaan 32 Daerah Irigasi Rawa dan 7 Daerah Irigasi dapat direalisasikan sebanyak 16 Daerah Irigasi Rawa dan 4 Daerah Irigasi. Namun, untuk pekerjaan rehabilitasi saluran yaitu dari target 550 m dapat dilaksanakan sepanjang 2.892 m karena adanya bantuan dana DAK. Sehingga kinerja melebihi target yaitu sebesar 183,24 % pada tahun 2018 .Hal ini menunjukkan kinerja mengalami peningkatan dari tahun 2017 mampu terealisasi melebihi target yaitu 7 Daerah Irigasi dan 27 Daerah Irigasi Rawa atau capaian kinerja 142,11%.

- Kapasitas intake & jaringan air baku yang dikelola

Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak ada kegiatan baik pembangunan, rehabilitasi dan operasi & pemeliharaan jaringan air baku.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Panjang dan jumlah bangunan pada jaringan irigasi/ rawa yang baru dibangun

Realisasi tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan target 500 m dapat direalisasikan sebesar 404 m pada tahun 2018 dan pada tahun 2017 sebesar 350 m.

- Jumlah daerah irigasi/ rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara

Capaian Kinerja mengalami peningkatan sebesar 41,11% dari tahun 2017 dimana mampu terealisasi melebihi target yaitu 7 Daerah Irigasi dan 27 Daerah Irigasi Rawa atau capaian kinerja 142,11%. Pada tahun 2018 capaian kinerja sebesar 183,24%.

- Kapasitas intake & jaringan air baku yang dikelola

Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak ada kegiatan baik pembangunan, rehabilitasi dan operasi & pemeliharaan jaringan air baku.

3. Perbandingan Realisasi dengan Target

- Panjang dan jumlah bangunan pada jaringan irigasi/ rawa yang baru dibangun

Capaian kinerja indikator ini mengalami peningkatan karena adanya Dana sisa tahun 2017 *mandatorie budget*.

- Jumlah daerah irigasi/ rawa kewenangan yang direhabilitasi dan dipelihara

Indikator ini mampu mengalami peningkatan kinerja karena adanya bantuan anggaran dari dana DAK.

- Kapasitas intake & jaringan air baku yang dikelola

Pada tahun 2016, 2017 dan 2018 tidak ada kegiatan baik pembangunan, rehabilitasi dan operasi & pemeliharaan jaringan air baku.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

- Pembangunan DI Kinarum 1.004 Ha Kab. Tabalong
- Supervisi Pembangunan DI Kinarum 1.004 Ha Kab. Tabalong
- Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Tanggul Lungau Kab.HSS
- Supervisi Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Tanggul Lungau Kab.HSS
- Peningkatan daerah irigasi rawa polder bakar kab. HSU
- Supervisi Peningkatan daerah irigasi rawa polder bakar kab. HSU
- Rehabilitasi DI Intangan Kab. HST
- Supervisi Rehabilitasi DI Intangan Kab. HST
- Pemeliharaan berkala daerah irigasi rawa 1.00 Ha – 3.000 Ha
- Pemeliharaan berkala daerah irigasi kewenangan Pemprov

Capaian Kinerja Bina Marga dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan dan jembatan provinsi	Persentase kenaikan panjang jalan provinsi kondisi baik dan sedang	1,5%	1,5%	100%
		Persentase kenaikan panjang jembatan provinsi kondisi baik dan sedang	0,5%	0,5%	100%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan data capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Persentase kenaikan panjang jalan provinsi kondisi baik dan sedang	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	100%
	Persentase kenaikan panjang jembatan provinsi kondisi baik dan sedang	1,5%	1,5%	0,5%	0,5%	100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Indikator kenaikan panjang jalan provinsi kondisi baik dan sedang telah terealisasi sesuai target sebesar 1.5% dengan capaian 100%
- Indikator kenaikan panjang jembatan provinsi kondisi baik dan sedang telah mencapai target sebesar 0.5% dengan capaian 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Indikator kenaikan panjang jalan provinsi kondisi baik dan sedang telah terealisasi sesuai target sebesar 1.5% dengan capaian 100% baik pada tahun 2016, 2017 , dan 2018.
- Indikator kenaikan panjang jembatan provinsi kondisi baik dan sedang telah mencapai target sebesar 1.5% dengan capaian 100% baik pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2018 juga tercapai 100% dengan target 0,5%.

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2018 Bidang Bina Marga melaksanakan pembangunan jalan sepanjang 36,5 km dan pembangunan jembatan sepanjang 100 m, sehingga pada akhir tahun 2018 tingkat kemantapan jalan provinsi naik sebesar 1,5 % dan kemantapan Jembatan naik sebesar 0,5%

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pencapaian kinerja Kepala Bidang Bina Marga tidak luput didukung oleh para kepala seksi yang ada di bidang Bina Marga yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan					
1	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kebinamargaan	Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan dan pelaporan bidang bina marga	1 dok	1 dok	100%
Seksi Jalan					
2	Melaksanakan pembangunan jalan sesuai dengan standar bina marga	Panjang jalan yang akan di bangun pada tahun berjalan	36 km	36 km	100%
Seksi Jembatan					
3	Melaksanakan pembangunan jembatan sesuai dengan standar bina marga	Pembangunan jembatan yang akan di bangun pada tahun berjalan	Jembatan eq 20 m, pondasi sumuran 4 titik	Jembatan eq 20 m, pondasi sumuran 4 titik	100%

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	Tahun 2018
-----	-------------------	-----------	------------

		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan dan pelaporan bidang bina marga	11 dok	7 dok	1 dok	1 dok	100%
2	Panjang jalan yang akan di bangun pada tahun berjalan	250 m	300m	36 km	36 km	100%
3	Pembangunan jembatan yang akan di bangun pada tahun berjalan	27 DIR	29 DIR	Jembatan eq 20 m, pondasi sumuran 4 titik	Jembatan eq 20 m, pondasi sumuran 4 titik	100%

a. Seksi Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

- Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Realisasi kinerja indikator sudah sesuai target yang ditetapkan pada tahun yaitu sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Indikator ini memiliki kinerja yang stabil karena juga telah sesuai target yang ditetapkan yaitu dengan capaian 100% baik pada tahun 2016, 2017 dan 2018.

3. Perbandingan Realisasi dengan Target

- Jumlah dokumen perencanaan, pengawasan, dan pelaporan.

Indikator jumlah dokumen perencanaan, pengawasan, dan pelaporan memiliki kinerja yang stabil karena realisasi telah sesuai target yang ditetapkan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Penyusunan dan Perencanaan Program Jalan dan Jembatan
- DED Jalan Bebas Hambatan Tol Banjarbaru - Batulicin

b. Seksi Jalan

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator panjang jalan yang dibangun terealisasi sebesar 36 km dari target 36 km atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator panjang jalan yang dibangun mampu mencapai target kinerja dengan capaian 100% baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018.

3. Analisa Peningkatan / Penurunan Kinerja

Indikator panjang jalan yang dibangun mempunyai kinerja stabil dari tahun 2017 hingga 2018.

4. Analisa Program/ Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Peningkatan Jalan Simpang 3 Tahura - Aranio
- Peningkatan Jalan Gambut - Pulau Sari
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi
- Peningkatan Jalan Dahai - Tanjung
- Peningkatan Jalan Sei Mandala - Sei Buluh
- Peningkatan Jalan Trikora
- Peningkatan Jalan Poros, Lingkungan Perkantoran Prov. Kalsel
- Pembangunan Jalan Anjir Pasar - Marabahan
- Peningkatan Jalan Panjang - Pulau Nyiur - Batu Mandi
- Peningkatan Jalan Guntung - Panaitan - Lampihong
- Peningkatan Jalan Dalam Kota Banjarmasin
- Pembangunan Jalan Kiram - Simpang 3 Tahura - Mandiangin
- Peningkatan Jalan Batulicin - Mekarsari - Mentewe
- Peningkatan Jalan Paringin - Halong
- Peningkatan Jalan Golf Banjarbaru
- Peningkatan Jalan Negara - Muara Tapus
- Peningkatan Jalan Banjarmasin - Martapura

- Peningkatan Jalan Tanjung - Muara Uya
- Peningkatan Jalan Pelaihari - Batakan
- Peningkatan Jalan Birayang - Tariwin - Lok Batu - Batumandi
- Peningkatan Jalan Lumpangi - Loksado
- Pembangunan Jalan Simpang 4 Gatot Subroto - Lingkar Dalam Selatan
- Peningkatan Jalan Tanjung Serdang - Lontar
- Peningkatan Jalan Kandangan - Negara
- Peningkatan Jalan Rantau - Muara Muning - Margasari
- Pembangunan Jalan Gunung Kupang - Kiram
- Pembangunan Jalan Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru (Paket 1)
- Pembangunan Jalan Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru (Paket 2)
- Pembangunan Jalan Angsana
- Peningkatan Jalan Lingkar Binuang
- Peningkatan Jalan Pandahan - Margasari
- Peningkatan Jalan Amuntai - Lampihong - Paringin
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Batulicin - Mentewe (DAK)
- Pembangunan Jalan Paramasan Bawah - Paramasan Atas (DID)
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Pelaihari - Batakan (DAK)
- Pembangunan Jalan Gunung Kupang - Kiram (DID)
- Pembangunan Jalan Kiram - Gunung Mawar (DID)
- Pembangunan Jalan Jejangkit Muara - Ray 7
- Pembangunan Jalan Ray 7 - Desa Bahandang
- Pembangunan Jalan Desa Bahandang - Desa Keliling Banteng
- Peningkatan Jalan Mekarsari - Mentewe
- Peningkatan Jalan Tanjung - Serdang Lontar II
- Peningkatan Jalan Kiram - Mandiangin
- Pembangunan Jalan Paramasan

c. Seksi Jembatan

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Indikator panjang jembatan yang dibangun mampu mencapai target 2 buah dengan capaian kinerja sebesar 100% pada tahun 2018.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator panjang jembatan yang dibangun mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 2 buah dengan capaian kinerja 100% baik pada tahun 2017 dan 2018.

3. Analisa Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Indikator panjang jembatan yang dibangun memiliki kinerja stabil dengan capaian kinerja 100% pada tahun 2017 dan 2018.

4. Analisa Program/ Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi
- Peningkatan Jalan Lumpangi - Loksado
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Batulicin - Mentewe (DAK)
- Peningkatan Jalan dan Jembatan Pelaihari - Batakan (DAK)
- DED Jembatan Batulicin – Mentewe

5. Bidang Cipta Karya

Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar air minum dan sanitasi	Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yg aman	4,87%	3,35%	68,79%
		Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%)	5,38%	9,87%	183,45%
2	Meningkatnya Kondisi Baik Infrastruktur Publik dan Aparatur	Jumlah sarana dan aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN	100%	96,44%	96,44%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan data capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yg aman	*	1,14%	4,87%	3,35%	68,79%
2	Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%)	*	2,55%	5,38%	9,87%	183,45%
3	Jumlah sarana dan aparatur perkantoran sesuai dengan Permen PU No.45/2007 dan HSGBN					
	- Publik	*	80,55%	86,1%	86,1%	100%
	- Aparatur	*	68,08%	83%	83%	100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman
Pada tahun 2018 dengan target 4,87% , indikator ini hanya mengalami kenaikan sebesar 1,14%.
- Indikator Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%) pada tahun 2018 hanya mampu mencapai kinerja 2,55% dari target 5,38%.
- Jumlah sarana dan prasarana publik & aparatur perkantoran yang mendapat bantuan teknis perencanaan & pembangunan
Jumlah sarana dan prasarana publik telah berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 86,1% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 86,1% untuk jumlah sarana dan prasarana aparatur sudah mencapai target kinerja sebesar 83% dari target 83%.

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman pada tahun 2018 dengan target 4,87% , indikator ini hanya mengalami kenaikan sebesar 1,14%.
- Indikator Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%) pada tahun 2018 hanya mampu mencapai kinerja 2,55% dari target 5,38%.
- Jumlah sarana dan prasarana public & aparatur perkantoran yang mendapat bantuan teknis perencanaan & pembangunan
Jumlah sarana dan prasarana publik telah berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 86,1% dari target 86,1% dan sebesar 80,55% pada tahun 2017 dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,3% dan tahun 2016 dengan capaian sebesar 59,46% dari target 58,3%. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana aparatur belum mencapai target kinerja sebesar 74,5% hanya terealisasi sebesar 68,08% dan pada tahun 2016 dengan capaian 51,06% dari target 53,2% dan pada tahun 2018 sudah terealisasi 83% dari target 83%.

3) Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

Pencapaian kinerja Kepala Bidang Cipta Karya tidak luput didukung oleh para kepala seksi yang ada di bidang Cipta Karya yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan					
1	Pembinaan teknis keciptakaryaan	Jumlah SDM yang dibina terkait keciptakaryaan	60 orang	60 orang	100%
2	Penyusunan dokumen perencanaan cipta karya	Jumlah dokumen perencanaan bidang Cipta Karya (Renstra, Renja, PK, APBD, APBD-P)	5 dok	5 dok	100%
		Jumlah dokumen kajian teknis dan desain keciptakaryaan	9 dok	9 dok	100%
Seksi Penataan Bangunan					
3	Kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja/ instansi terkait pengaturan, penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja/ instansi terkait pengaturan, penataan bangunan dan lingkungan	33 Unit kerja	33 Unit kerja	100%
4	Analisa tingkat kerusakan dan kebutuhan bangunan publik/ aparatur	Jumlah bangunan hasil analisa untuk direhabilitasi	10 bangunan	15 bangunan	150%
		Jumlah bangunan hasil analisa untuk dibangun	10 bangunan	25 bangunan	250%
5	Melaksanakan pembangunan bangunan gedung publik/ aparatur	Jumlah bangunan publik/ aparatur yang dibangun oleh bidang cipta karya	7 bangunan	6 bangunan	85%
Seksi Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan					
6	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana AMPLP	Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana air minum	4 unit	4 unit	100%

		Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana air minum	29 unit	29 unit	100%
--	--	--	---------	---------	------

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Jumlah SDM yang dibina terkait keciptakarya	*	*	60 orang	60 orang	100%
2	Jumlah dokumen perencanaan bidang Cipta Karya (Renstra, Renja, PK, APBD, APBD-P)	*	*	5 dok	5 dok	100%
3	Jumlah dokumen kajian teknis dan desain keciptakarya	*	*	9 dok	9 dok	100%
4	Jumlah kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja/ instansi terkait pengaturan, penataan bangunan dan lingkungan	*	*	33 Unit kerja	33 Unit kerja	100%
5	Jumlah bangunan hasil analisa untuk direhabilitasi	*	*	10 bangunan	15 bangunan	150%
6	Jumlah bangunan hasil analisa untuk dibangun	*	*	10 bangunan	25 bangunan	250%
7	Jumlah bangunan publik/ aparaturnya yang dibangun oleh bidang cipta karya	*	*	7 bangunan	6 bangunan	85%
8	Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana air minum	*	*	4 unit	4 unit	100%
9	Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana air minum	*	*	29 unit	29 unit	100%

Kepala Bidang Cipta Karya didukung oleh kepala seksi yang ada di Bidang Cipta Karya:

- a. Seksi Pembinaan Teknis Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan

- Realisasi Jumlah SDM yang dibina terkait keciptakaryaannya terealisasi sebesar 60 orang dari target yang ditetapkan sebesar 60 orang.
- Jumlah dokumen perencanaan bidang cipta karya telah tercapai sebesar 5 dokumen dari target 5 dokumen.
- Realisasi jumlah dokumen kajian teknis dan desain keciptakaryaannya direalisasikan sebesar 9 dok dari target yang telah ditetapkan sebesar 9 dok.

Pada eselon IV bidang Cipta karya terdapat perubahan indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

- "Perencanaan dan Perbaikan Lapangan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin"
- Review Penyusunan Masterplan Sport Center
- Sosialisasi dan Pelatihan Air Minum dan PLP
- Penyusunan dan Perencanaan Program Bidang Cipta Karya
- Review Masterplan Perkantoran dan Penyusunan Masterplan Drainase dan Penghijauan di Kawasan Perkantoran di Banjarbaru
- DED Monumen Pal Nol
- "Perencanaan Perbaikan Taman dan Pembangunan Sarana dan Prasarana TMII Jakarta"
- DED Gedung Samsat Amuntai
- DED Taman Budaya Baru di Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel
- DED Jaringan Listrik Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel
- Masterplan Istana Mahligai Rakyat
- Sayembara Masjid Bambu
- Perencanaan Rehab Gedung Ramah difabel di 4 Gedung Pemprov

b. Seksi Penataan Bangunan

- Jumlah kerjasama dengan satuan kerja/ unit kerja/ instansi terkait pengaturan, penataan bangunan dan lingkungan telah tercapai sebesar 33 unit kerja dari target 33 unit kerja.

- Jumlah bangunan hasil analisa untuk direhabilitasi telah tercapai sebesar 15 bangunan dari target 10 bangunan.
- Jumlah bangunan hasil analisa untuk dibangun telah tercapai sebesar 25 bangunan dari target 10 bangunan.
- Jumlah bangunan publik/ aparaturnya yang dibangun oleh bidang cipta karya telah tercapai sebesar 6 bangunan dari target 25 bangunan.

Pada eselon IV bidang Cipta karya terdapat perubahan indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

- Pembangunan Gedung BPSDM Prov. Kalsel di Banjarbaru
- "Perencanaan dan Perbaikan Lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin"
- "Perencanaan dan Pembuatan Trotoar dan Pagar Keliling di Lingkungan Kantor Setda Prov. Kalsel di Banjarbaru"
- Renovasi / Rehab. Rumah Jabatan / Dinas Ess I di Banjarmasin
"Perencanaan dan Pembuatan Shalter serta Pembuatan pagar VIP Room di Banjarbaru"
- Rehab Rumah Jabatan / Dinas Eselon II di Banjarbaru (Batal)
- Pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas (Batal)
- Perbaikan/Rehabilitasi Instalasi Jaringan Listrik Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru
- "Pembuatan Kantor dan Laboratorium Unit Pelayanan Jasa Sumber Mineral dan Energi"
- Rehabilitasi Kantor Ex Kesbangpol
- Renovasi Ruangan Kantor Komandan Lanud Syamsudin Noor
- Pembangunan Kantor Samsat Tanjung
- Pembangunan Gedung Rapat BAKEUDA
- Pembangunan Gedung Mess Biliton dan TMII
- Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Kantor Gubernur di Banjarmasin
- Pembangunan Pintu Gerbang Kantor KWS Perkantoran di Banjarbaru (Batal)

- Pembangunan Kantor Samsat Kandungan
- Rehabilitasi Atap Makam Hasan Basri
- Pembangunan Gerbang dan Lanal
- "Perencanaan Perbaikan Taman dan Pembangunan Sarana dan Prasarana TMII Jakarta"
- DED Gedung Samsat Amuntai
- DED Taman Budaya Baru di Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel
- "Perbaikan Rehab Instalasi Jaringan Listrik Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel"
- Pembangunan Mako Brimob dan Rindam
- Perbaikan/Renovasi Mako Brimob
- Perbaikan/Renovasi Korem (Batal)
- Perencanaan Rehab Gedung Pramuka di Banjarmasin
- Pembangunan Hellipad
- DED Lanjutan Makam Syeh Arsyad Al Banjari
- Perencanaan Rehab Gedung Ramah difabel di 4 Gedung Pemprov
- DED Taman makam Pahlawan dan makam Idham Khalid
- Eskalasi Kantor Setda di Banjarmasin

c. Seksi Penyehatan Lingkungan, Air Minum dan Bangunan

- Jumlah pembangunan sarana/ fasilitas terkait distribusi air minum terealisasi sebesar 4 unit dari target 4 unit.
- Realisasi jumlah pembangunan sarana/ fasilitas terkait distribusi sanitasi pada tahun 2018 sebesar 29 buah dari target yang telah ditetapkan sebesar 29 buah.

Pada eselon IV bidang Cipta karya terdapat perubahan indikator kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah

- Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan ME (Batal)
- Perencanaan dan Pembangunan IPAL Setda Prov Kalsel
- Perbaikan Sarana dan Prasarana WC/KM Masyarakat
- Pembangunan Fasilitas Air Minum Desa Galam Rabah Kab. Banjar

- Pembangunan WC Umum di Pondok Pesantren Al Falah
- Pembangunan Fasilitas Air Bersih Desa Bangun Rabah dan Desa Jejangkit (Batola)

6. Bidang Bina Konstruksi

Capaian Kinerja Bidang Bina Konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kapasitas tertib penyelenggaraan konstruksi berupa tertib penyelenggara lelang, tertib administrasi kontrak, tertib konstruksi berkelanjutan dan tertib manajemen mutu	Presentase tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi pertahun	100%	100%	100%
2	Meningkatnya SDM jasa konstruksi yang kompeten di daerah baik laki-laki maupun perempuan	Jumlah SDM jasa konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikat bidang jasa konstruksi pertahun	100%	100%	100%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan data capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Presentase tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi pertahun	*	*	100%	100%	100%
3	Jumlah SDM jasa konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikat bidang jasa konstruksi pertahun	*	*	100%	100%	100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Indikator Presentase tingkat tertib penyelenggaraan konstruksi pertahun telah terealisasi 100% dari target 100%

- Indikator Jumlah SDM jasa konstruksi yang kompeten dan memiliki sertifikat bidang jasa konstruksi pertahun telah terealisasi 100% dari target 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator eselon III Bidang Bina Konstruksi terjadi perubahan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja Kepala Bidang Bina Konstruksi tidak luput didukung oleh para kepala seksi yang ada di bidang Bina Konstruksi yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Pemberdayaan					
1	Melaksanakan pemberdayaan/ pembinaan SDM profesional yang kompeten baik laki-laki maupun perempuan bidang jasa konstruksi	Peningkatan jumlah SDM/ tenaga ahli yang terlatih, ahli dan terampil jasa konstruksi bersertifikat	130 orang	90 orang	70%
Seksi Monev & Pengaturan					
2	Melaksanakan monitoring/ evaluasi pembinaan pengaturan tertib jasa konstruksi	Jumlah Kabupaten/kota yang sesuai perundang undangan Jasa Konstruksi	13 Kab/Kota	13 Kab/Kota	100%
		Jumlah Raperda, Perda IUJK dan Keputusan Kepala Daerah yang tersusun mengatur tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	1 Perda	1 Perda	100%
		Jumlah kabupaten/ kota yang terampil dalam penyelenggaraan SIPJAKI	13 Kab/Kota (40 org)	13 Kab/Kota (40 org)	100%
Seksi Pengawasan					
3	Melaksanakan pembinaan/ pengawasan tertib jasa konstruksi	Jumlah asosiasi dan badan usaha jasa konstruksi yang terbina dan terampil	30 orang	30 orang	100%
		Jumlah asosiasi penyedia jasa/ tenaga ahli jasa konstruksi yang di daerah provinsi	13 kab/kota	13 kab/kota	100%

3) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Program Pengaturan Jasa Kontruksi

- Pelatihan Tukang/Mandor bagi Penyedia Jasa
- Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Bimtek sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan (SMK4) Konstruksi
- Penyusunan Peraturan Daerah Jasa Konstruksi
- Sosialisasi Peraturan Per Undang-undangan Konstruksi
- Program, Perencanaan dan Monev Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi
- Sistem Informasi pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI)
- Bimtek Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
- Uji Kompetensi Tenaga Terampil
- Bimtek Hukum Administrasi Kontrak dan PBJ (Pengadaan Barang Jasa)
- Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota se Kalsel

7. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

Capaian Kinerja Penataan Ruang dan Pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	66%	66%	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan penguasaan/penyediaan tanah untuk proyek pembangunan	20%	20%	100%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan data capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang	62%	64%	66%	66%	100%
	Persentase pelaksanaan kegiatan penguasaan/penyediaan tanah untuk proyek pembangunan	-	-	20%	20%	100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Indikator persentase pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang telah terealisasi sesuai target sebesar 66% dengan capaian 100%
- Indikator persentase pelaksanaan kegiatan penguasaan/penyediaan tanah untuk proyek pembangunan telah mencapai target sebesar 20% dengan capaian 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Indikator persentase pelaksanaan kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang telah terealisasi sesuai target sebesar 66% dengan capaian 100% meningkat dari 2016 sebesar 62% dan 2017 sebesar 64%.
- Indikator persentase pelaksanaan kegiatan penguasaan/penyediaan tanah untuk proyek pembangunan telah mencapai target sebesar 20% dengan capaian 100%. Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada kegiatan pembebasan tanah.

Pencapaian kinerja Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan tidak luput didukung oleh para kepala seksi yang ada di bidang Penataan Ruang dan Pertanahan yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Seksi Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Penataan Ruang					
1	Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kab/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kab/kota	Persentase penyelesaian revisi perda rencana tata ruang wilayah	10%	10%	100%
		Jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten	1	0%	-
Seksi Penataan Ruang					
2	Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi	Persentase penyelesaian perda/pergub rencana rinci tata ruang dan turunannya	17,71%	17,71%	100%
		Jumlah telaahan analisa kesesuaian tata ruang	20	20	100%
Seksi Pertanahan					
3	Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi	Jumlah luas tanah yang dibebaskan pada akhir tahun berjalan	11,1 ha	1,75 ha	15,8%
		Jumlah luas cakupan peta lokasi, nilai tanah, dan data aset pertanahan pemerintah provinsi	3 dok	3 dok	100%

3) Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja

Untuk pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota, persentase penyelesaian revisi perda rencana tata ruang wilayah sesuai dengan target, 10%

persiapan untuk kegiatan Peninjauan Kembali RTRW, mengumpulkan data terkait untuk Peninjauan Kembali RTRW.

Untuk jumlah rekomendasi dan evaluasi gubernur terhadap rencana umum dan rencana rinci tata ruang kota/kabupaten belum ada, dikarenakan :

- Untuk RTR KSP Rawa Batang Banyu masih dalam proses penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang belum mendapat validasi Kementerian LHK.
- Sedangkan untuk RTR KSK (Kab./kota) belum ada yang mengajukan rekomendasi gubernur. Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Kuala sudah mendapat rekomendasi dari BIG untuk peta dasar, tetapi belum sempat mengajukan rekomendasi gubernur.

Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang provinsi, untuk persentase penyelesaian perda/pegrub rencana rinci tata ruang dan turunannya sesuai dengan target, 17,71% RTR KSP Rawa Batang Banyu pada tahap penyusunan KLHS, yang masih dalam proses validasi ke Kementerian LHK.

Untuk jumlah telaahan analisa kesesuaian ruang berjumlah 20, sesuai target.

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, Jumlah luas tanah yang dibebaskan pada akhir tahun berjalan hanya 15,8% dari 11,1 ha (1,75 ha).

- Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses ke Makam Syech M.Arsyad Al-Banjar, pelaksanaan Ganti Rugi tidak dapat direalisasikan karena Pelaksana Pengadaan Tanah (Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalsel) hanya sampai pada tahapan penyusunan data nominatif
- Pembebasan Lahan Margasari - Buas-buas, kegiatan Pembebasan Lahan tidak dapat diselesaikan karena masyarakat setempat menginginkan trase jalan yang digunakan menggunakan trase yang lama yang sudah ditetapkan oleh Bupati Tapin, tetapi softcopy dari dokumen tersebut tidak bisa disampaikan ke DPUPR untuk bahan proses selanjutnya

Jumlah luas cakupan peta lokasi, nilai tanah, dan data aset pertanahan pemerintah provinsi, sesuai dengan target, 3 dokumen.

4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

1) Program Penataan Ruang

- Penertiban Pemanfaatan Ruang
- Pengendalian Pemanfaatan Kawasan dan Ruang
- "Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Zonasi Lintas Kabupaten/Kota"
- Evaluasi Konversi Pemanfaatan Ruang
- "Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang untuk Kawasan Strategis Provinsi"

2) Program Perencanaan Tata Ruang

- Sinkronisasi Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
- Percepatan Persetujuan Subtansi Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
- Sosialisasi NSPK dan SPM Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
- Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
- Penyusunan KLHS RTRKSP Rawa Batang Banyu
- Study Pendahuluan Sport City

3) Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan

- Penyediaan Tanah untuk Pembangunan
- Inventarisasi Nilai Tanah Milik Negara/Pemerintah
- Pendataan atas Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah
- "Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan tentang Pertanahan"
- "Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses ke Makam Syech M.Arsyad Al-Banjar"
- Pembebasan Lahan Margasari - Buas-Buas
- Pembebasan Lahan Jalan Matraman - Sei. Ulin

8. Kesekretariatan

Capaian Kinerja Sekretariatan dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.22%	81,76%	104%
	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	100%	100%
	Pelayanan administrasi keuangan	Persentase aset yang tercatat	100%	100%	100%

Perbandingan Capaian Kinerja dengan data capaian tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		
		2016	2017	Target	Realisasi	%
1	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,31%	81,76%	78.22%	81,76%	104%
	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	97%	100%	100%	100%
	Persentase aset yang tercatat	100%	100%	100%	100%	100%

1) Perbandingan Realisasi dengan Target

- Indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terealisasi melebihi target sebesar 81,76% dengan capaian 104%
- Indikator pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD telah mencapai target 100%
- Indikator persentase aset yang tercatat telah mencapai target 100%

2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

- Indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah terealisasi sesuai target dan meningkat dari 2016 yang hanya sebesar 77,31% dan 2017 yang hanya sebesar 81,76%
- Indikator pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD telah mencapai target 100%
- Indikator persentase aset yang tercatat telah mencapai target dari tahun 2016 hingga tahun 2018 yaitu sebesar 100%.

Pencapaian kinerja Sekretaris tidak luput didukung oleh para kepala seksi yang ada di bidang kesekretariatan yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan					
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen perencanaan dalam 1 tahun	3	3	100%
		Jumlah dokumen pelaporan dalam 1 tahun	3	3	100%
Sub Bagian Keuangan dan Aset					
2	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan dan aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	6	6	100%
		Persentase aset yang tercatat	100	100	100%
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian					
3	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	100	100	100%

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2018

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 dapat menyerap dana APBD dan APBD-P sebesar Rp 508.936.0383.979 atau sebesar 90,67% dari pagu dana Rp 562.323.599.270 dengan capaian kinerja fisik sebesar 96,11% . Pada tahun 2018 terlihat bahwa telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dimana hampir semua kinerja utama telah tercapai dari target yang telah ditentukan dengan hanya menggunakan anggaran sebesar 90,67% dari anggaran yang tersedia.

2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
			Rp	Rp	%
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	67.452.994.710.00	59.904.893.323.00	88,81
2	Meningkatnya infrastruktur jalan/ jembatan yang terintegrasi dan berkualitas yang mendukung pergerakan orang, barang dan jasa	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	339.909.718.360.00	330.812.207.765.00	97,32
3	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum,	97.126.987.600.00	81.572.089.387.00	83,98

		Persampahan dan Limbah			
4	Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	97.126.987.600.00	81.572.089.387.00	83,98
5	Meningkatnya pelaksanaan penataan ruang daerah	Program Penataan Ruang	1.718.850.000.00	1.257.745.200.00	73,17
6	Meningkatnya kemampuan SDM baik laki- laki maupun perempuan penyelenggara dan penyedia jasa konstruksi	Program Pengaturan Jasa Kontruksi	1.980.590.000.00	1.609.222.345.00	81,25
7	Meningkatnya sarana dan prasarana dan teknologi penguji mutu konstruksi	Program Pengaturan Jasa Kontruksi	1.980.590.000.00	1.609.222.345.00	81,25
8	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Kesekretariatan	5.877.808.600	5.302.865.018	90,22

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan 2018
 Analisis perbandingan Program dan Kegiatan
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Tahun 2017 dan 2018

No	2017		No	2018	
	Nama Program	Nama Kegiatan		Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Jalan Rantau - Muara Muning - Margasari	1	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan	Peningkatan Jalan Simpang 3 Tahura - Aranio
		Peningkatan Jalan Gambut - Pulau Sari			Peningkatan Jalan Gambut - Pulau Sari
		Pembangunan Jalan Simpang 3 Balitra - Bandar			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi

	Udara Syamsuddin Noor	dan Jembatan	
	Rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi		Peningkatan Jalan Dahai - Tanjung
	Penyusunan dan Perencanaan Program Jalan dan Jembatan		Penyusunan dan Perencanaan Program Jalan dan Jembatan
	Pengaspalam Jalan RT.01 Desa Gunung Ulin Kec. Martapura Kab. Banjar		Peningkatan Jalan Sei Mandala - Sei Buluh
	Perbaikan Jembatan Desa Sungai Jelai Bnjarmasin		Peningkatan Jalan Trikora
	Peningkatan Jalan Pelaihari - Batakan		Peningkatan Jalan Poros, Lingkungan Perkantoran Prov. Kalsel
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Negara - Muara Tapus		Pembangunan Jalan Anjir Pasar - Marabahan
	Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut		Peningkatan Jalan Banjarang - Pulau Nyiur - Batu Mandi
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Banjarmasin - Martapura		DED Jalan Bebas Hambatan Tol Banjarbaru - Batulicin
	Pengaspalan Jalan Desa Dalam Pagar Kec. Martapura		Peningkatan Jalan Guntung - Panaitan - Lampihong
	Peningkatan Jalan Trikora - Kong Ex		Peningkatan Jalan Dalam Kota Banjarmasin
	Peningkatan Jalan Tanjung Serdang - Lontar		Pembangunan Jalan Kiram - Simpang 3 Tahura - Mandiangin
	Peningkatan Jalan Anjir Pasar - Marabahan		Peningkatan Jalan Batulicin - Mekarsari - Mentewe
	DED Jalan Bebas Hambatan Kota Banjarbaru - Batulicin		Peningkatan Jalan Paringin - Halong
	Peningkatan Jalan Dalam Kota Banjarmasin		Peningkatan Jalan Golf Banjarbaru
	Pembangunan Jalan Gunung Kupang - Kiram		Peningkatan Jalan Negara - Muara Tapus

		Peningkatan Jalan Batulicin - Mekarsari - Mentewe		Peningkatan Jalan Banjarmasin - Martapura
		Peningkatan Jalan Birawang - Tarwin - Lok Batu - Batu Mandi		Peningkatan Jalan Tanjung - Muara Uya
		Peningkatan Jalan Lampihong - Paringin - Halong		Peningkatan Jalan Pelaihari - Batakan
		Pembangunan Jembatan Barabai - Pagat		Peningkatan Jalan Birayang - Tariwin - Lok Batu - Batumandi
		Peningkatan Jalan Kandangan - Negara dan Lumpangi - Loksado		Peningkatan Jalan Lumpangi - Loksado
		Peningkatan/Pelebaran Jalan Golf Banjarbaru		Pembangunan Jalan Simpang 4 Gatot Subroto - Lingkar Dalam Selatan
		Peningkatan Jalan Banjarbaru - Simpang 3 Tahura		Peningkatan Jalan Tanjung Serdang - Lontar
		Pembangunan Jalan Banjarbaru - Bati-Bati		Peningkatan Jalan Kandangan - Negara
		• Peningkatan Jalan Tanjung - Muara Uya (DAK)		Peningkatan Jalan Rantau - Muara Muning - Margasari
		Peningkatan Jalan Banjarmasin - Martapura		Pembangunan Jalan Gunung Kupang - Kiram
		Pembangunan Jalan dan Jembatan Barabai - Pagat		Pembangunan Jalan Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru (Paket 1)
		Pembangunan Jalan Simpang 3 Kiram - Simpang 3 Tahura - Mandiangin		Pembangunan Jalan Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru (Paket 2)
		Pembangunan Jalan Pramasan Atas dan Pramasan Bawah		Pembangunan Jalan Angsana
		Peningkatan Jalan Pelaihari - Takisung		Peningkatan Jalan Lingkar Binuang
		Pembangunan Jalan Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru (Paket 1)		Peningkatan Jalan Pandahan - Margasari
		Pembangunan Jalan Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru (Paket 2)		Peningkatan Jalan Amuntai - Lampihong - Paringin

		Peningkatan Jalan Banjarbaru - Anario			Peningkatan Jalan dan Jembatan Batulicin - Mentewe (DAK)	
		Peningkatan Jalan Banjarbaru - Bati-bati			Pembangunan Jalan Paramasan Bawah - Paramasan Atas (DID)	
		Peningkatan Jalan Trikora Kawasan Perkantoran			Peningkatan Jalan dan Jembatan Pelaihari - Batakan (DAK)	
		Peningkatan Jalan Lumpangi - Loksado			Pembangunan Jalan Gunung Kupang - Kiram (DID)	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi			Pembangunan Jalan Kiram - Gunung Mawar (DID)	
		Pembangunan Embung Landasan Ulin			Pembangunan Jalan Jejangkit Muara - Ray 7	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai			Pembangunan Jalan Ray 7 - Desa Bahandang	
		Operasi dan pemeliharaan Jaringan Rawa			Pembangunan Jalan Desa Bahandang - Desa Keliling Banteng	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi			Peningkatan Jalan Mekarsari - Mentewe	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Jaringan Rawa			Peningkatan Jalan Tanjung - Serdang Lontar II	
		Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan			Peningkatan Jalan Kiram - Mandiangin	
		Pelaksanaan Lomba Petugas OP Irigasi dan Rawa Tingkat Provinsi			DED Jembatan Batulicin - Mentewe	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Embung			Pembangunan Jalan Paramasan	
		Pengelolaan Data Hidrologi	2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air		Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Provinsi
		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumber Daya Air				Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa
		Pembangunan Jaringan Irigasi				"Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai"
		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa

		Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)		Penyusunan Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi
		Kongres Sungai Indonesia III di Kota Banjarmasin		Penyusunan Dokumen Perencanaan Jaringan Irigasi Rawa
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Batas fisik Kws. Perkantoran Pemprov. Kalsel di Banjarbaru		Penyusunan Dokumen Perencanaan Embung
		Perencanaan perluasan gedung kantor Dinas Pendidikan Pemprov. Kalsel dan sarana prasarananya di Banjarbaru		Pengelolaan Alat Hidrologi
		Perencanaan perluasan gedung kantor Inspektorat Prov. Kalsel dan sarana prasarananya di Banjarbaru		Perencanaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumber Daya Air
		Pembinaan Teknis, Evaluasi dan Monitoring pengelolaan bangunan gedung daerah Prov. Kalsel		Pembangunan Jaringan Irigasi
		Pengelolaan dan sosialisasi prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan		Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
		Renovasi/ Rehabilitasi Anjungan Kalsel di TMII dan Mess Kalsel di Rawamangun dan Biliton		Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK)
		Sayembara Desain dan Penyusunan DED Masjid Agung di Kawasan Perkantoran Banjarbaru dan Desain Tugu Titik Nol di Kawasan Perkantoran Pemprov. di Banjarmasin		Penyusunan Dokumen Perencanaan Drainase
		Pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas		Penyusunan Perencanaan Air Baku

		Perbaikan/rehabilitasi Instalasi Jaringan Listrik Kawasan Perksntoran Pemprov. Kalsel di Banjarbaru		Rehabilitasi Jaringan Irigasi
		Restorasi Jamban Terapung di Sepanjang Sungai Martapura		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
		Perencanaan Renovasi/ Rehab Rumah Jabatan/ Dinas Ess. Di Banjarbaru/ Bnjarmasin		"Pelaksanaan Integrated Participatory Development and Management Irrigation Program (IPDMIP)"
		Perbaikan Instalasi Penerangan Jalan Umum (PJU) serta Gardu 4		Kajian Teknis Normalisasi Sungai
	3	Perencanaan Perbaikan Lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	Pembangunan Gedung BPSDM Prov. Kalsel di Banjarbaru
		Perencanaan Pembuatan Kantor dan Laboratorium Unit Pelayanan Jasa Sumber Daya Mineral dan Energi		"Perencanaan dan Perbaikan Lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin"
		Perencanaan Renovasi Halaman Gedung Sultan Suriansyah dengan Lingkungan Taman Budaya		Review Penyusunan Masterplan Sport Center
		Perencanaan Rehab Gedung Legiun Veteran RI Kalsel dan Prasarana di Banjarmasin		Sosialisasi dan Pelatihan Air Minum dan PLP
		Rehab Kantor Kejati Kalsel (Hibah)		"Perencanaan dan Pembuatan Trotoar dan Pagar Keliling di Lingkungan Kantor Setda Prov. Kalsel di Banjarbaru"
		Rehab Pagar Tembok dan Gapura Outmil 1 - 06 Banjarmasin (Hibah)		Penyusunan dan Perencanaan Program Bidang Cipta Karya

		Rehab Rumah Jabatan/ Dinas Eselon II di Banjarbaru	Renovasi / Rehab. Rumah Jabatan / Dinas Ess I di Banjarmasin "Perencanaan dan Pembuatan Shalter serta Pembuatan pagar VIP Room di Banjarbaru"
		Perbaikan/ Rehab Instalasi Jaringan Listrik Tegangan Menengah (TM) pada Terminal Box (TB)	Pengadaan dan Pemasangan Pipa dan ME (Batal)
		Perencanaan Masjid Rakha dan Halaman di Ponpes Rakh di Amuntai (Hibah Barang)	Rehab Rumah Jabatan / Dinas Eselon II di Banjarbaru (Batal)
		DED Penataan Kawasan Pelampayan	Evaluasi dan Monitoring Bangunan Gedung di Daerah Prov. Kalsel
		DED Toilet Masjid Raya Sabilal Muhtaddin	Review Masterplan Perkantoran dan Penyusunan Masterplan Drainase dan Penghijauan di Kawasan Perkantoran di Banjarbaru
		Perencanaan Rehab Gedung Barak Brimob	Pembangunan Taman Edukasi Lalu Lintas (Batal)
		DED Gedung Samsat	Perbaikan/Rehabilitasi Instalasi Jaringan Listrik Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarbaru
		DED Gedung AULA MES Biliton dan Pembangunan Gedung Penunjang TMII	DED Monumen Pal Nol
		Rehabilitasi Halaman Gedung Pemprov. Di Banjarmasin	"Pembuatan Kantor dan Laboratorium Unit Pelayanan Jasa Sumber Mineral dan Energi"
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Perencanaan/ DED (Penataan Penghijauan dan Taman) Kawasan Kantor Gubernur	Rehabilitasi Kantor Ex Kesbangpol
4	Program Penataan Ruang	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (Kws. Rawa Batang Banyu)	Renovasi Ruangan Kantor Komandan Lanud Syamsudin Noor
		Sosialisasi Perda Rencana Tata Ruang	Pembangunan Kantor Samsat Tanjung
		Review RTRW Provinsi Kalimantan Selatan	Pembangunan Gedung Rapat BAKEUDA

		Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan		Pembangunan Gedung Mess Biliton dan TMII
		Evaluasi Pemanfaatan Ruang		Perencanaan dan Pembangunan IPAL Setda Prov Kalsel
5	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelatihan tukang/ Mandor bagi penyedia jasa		Perbaikan Sarana dan Prasarana WC/KM Masyarakat
		Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi		Pembangunan Sarana dan Prasarana RTH Kantor Gubernur di Banjarmasin
		Perundang-undangan Jasa Konstruksi		Pembangunan Pintu Gerbang Kantor KWS Perkantoran di Banjarbaru (Batal)
		Pembinaan Jasa Konstruksi Kab./ Kota se-Kalsel		Pembangunan Kantor Samsat Kandangan
		Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI)		Rehabilitasi Atap Makam Hasan Basri
		Bimtek Penanggung jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU)		Pembangunan Gerbang dan Lanal
		Penyusunan Peraturan Daerah mengenai jasa konstruksi		"Perencanaan Perbaikan Taman dan Pembangunan Sarana dan Prasarana TMII Jakarta"
		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		DED Gedung Samsat Amuntai
				DED Taman Budaya Baru di Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel
TOTAL	6	95		"Perbaikan Rehab Instalasi Jaringan Listrik Kawasan Perkantoran Pemprov. Kalsel"
	TOTAL ANGGARAN			Pembangunan Fasilitas Air Minum Desa Galam Rabah Kab. Banjar
	565.703.424.006			DED Jaringan Listrik Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel
				Pembangunan Mako Brimob dan Rindam
				Perbaikan/Renovasi Mako Brimob
				Perbaikan/Renovasi Korem (Batal)
				Perencanaan Rehab Gedung Pramuka di Banjarmasin
				Pembangunan WC Umum di Pondok Pesantren Al Falah

		Masterplan Istana Mahligai Rakyat
		Sayembara Masjid Bambu
		Pembangunan Fasilitas Air Bersih Desa Bangun Rabah dan Desa Jejangkit (Batola)
		Pembangunan Heliport
		DED Lanjutan Makam Syeh Arsyad Al Banjari
		Perencanaan Rehab Gedung Ramah difabel di 4 Gedung Pemprov
		DED Taman makam Pahlawan dan makam Idham Khalid
		Eskalasi Kantor Setda di Banjarmasin
4	Program Penataan Ruang	Penertiban Pemanfaatan Ruang
		Pengendalian Pemanfaatan Kawasan dan Ruang
		"Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Zonasi Lintas Kabupaten/Kota"
		Evaluasi Konversi Pemanfaatan Ruang
		"Pembuatan Sistem Informasi Tata Ruang untuk Kawasan Strategis Provinsi"
5	Program Perencanaan Tata Ruang	Sinkronisasi Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi
		Percepatan Persetujuan Subtansi Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
		Sosialisasi NSPK dan SPM Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
		Penyusunan Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota
		Penyusunan KLHS RTRKSP Rawa Batang Banyu
		Study Pendahuluan Sport City
6	Program Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan
		Inventarisasi Nilai Tanah Milik Negara/Pemerintah
		Pendataan atas Pengadaan Tanah oleh Instansi Pemerintah

		"Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-undangan tentang Pertanahan"
		"Pembebasan Lahan Jalan Alternatif Akses ke Makam Syech M.Arsyad Al-Banjar"
		Pembebasan Lahan Margasari - Buas-Buas
		Pembebasan Lahan Jalan Matraman - Sei. Ulin
7	Program Pengaturan Jasa Kontruksi	Pelatihan Tukang/Mandor bagi Penyedia Jasa
		Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
		Bimtek sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan dan Keberlanjutan (SMK4) Konstruksi
		Penyusunan Peraturan Daerah Jasa Konstruksi
		Sosialisasi Peraturan Per Undang-undangan Konstruksi
		Program, Perencanaan dan Monev Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
		Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi
		Sistem Informasi pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia (SIPJAKI)
		Bimtek Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha
		Uji Kompetensi Tenaga Terampil
		Bimtek Hukum Administrasi Kontrak dan PBJ (Pengadaan Barang Jasa)
		Pembinaan Jasa Konstruksi Kab/Kota se Kalsel
		TOTAL
	7	143
		TOTAL ANGGARAN
		561.323.599.270

Perbandingan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2017 dan 2018

No	2017		2018	
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,	39 keg	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,	47 keg

	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	15 keg	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	18 keg
3	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	27 keg	Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik, Aparatur, Perumahan, Air Minum, Persampahan dan Limbah	47 keg
4	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1 keg	-	--
5	Program Penataan Ruang	5 keg	Program Penataan Ruang	5 keg
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	8 keg	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	12 keg
7	-	-	Perencanaan Tata Ruang	6 keg
8	-	-	Program Penyediaan Tanah untuk Pembangunan	7 keg
JUMLAH	6 program	95 keg	7 program	130 keg

Perbandingan APBD Tahun 2017 dan 2018

No.	2017		2018	
	Belanja Langsung	Jumlah	Belanja Langsung	Jumlah
1.	Belanja pegawai	980.150.000,00	Belanja pegawai	3.994.075.000,00
2.	Belanja barang dan jasa	23.022.850.000,00	Belanja barang dan jasa	45.272.646.600,00
	Total	24.003.000.000,00	Total	49.226.721.000,00

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya peningkatan anggaran belanja barang dan jasa pada tahun 2018 dibandingkan 2017 , hal ini dikarenakan bertambahnya tenaga kerja honorer di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatn, selaiin itu juga terdapat tenaga kerja KI, honor narasumber dan PPTK.

Dari 5 sasaran strategis, terdapat 4 sasaran yang capaian kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi yaitu:
1. meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air dan penegendalian daya rusak air dengan tingkat efisiensi sebesar

5,39%

2. meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur dengan tingkat efisiensi sebesar 16,01%

3. meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi dengan tingkat efisiensi sebesar 43,44%

4. meningkatnya pelaksanaan penataan ruang daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 12,92%

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Pencapaian sasaran yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) sasaran strategis dan 15 indikator kinerja utama yaitu 91% dengan kategori **Sangat Memuaskan**, dengan rincian 10 (sepuluh) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Memuaskan**, 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Baik**, 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Baik**, 2 (dua) Indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Kurang**.

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan masih akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur menjadi isu strategis yang utama bersama penguatan domestik *connectivity*, penguatan ketahanan pangan, penyediaan air minum serta terpadunya pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam meningkatkan kinerja antara lain:

1. Menggunakan sistem aplikasi berbasis web untuk melakukan pengumpulan kinerja melalui My Data PUPR
2. Melakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelelangan barang dan jasa sejak dini agar waktu pekerjaan bisa lebih cepat dan meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja serta manfaat pekerjaan bisa dirasakan lebih awal.
2. Menyenggarakan asistensi dan pelatihan bagi pejabat struktural tentang sistem akuntabilitas kinerja.
3. Menampilkan capaian kinerja di Web resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Selatan**

ROY RIZALI ANWAR, ST,MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19810430 200312 1 006